

BAB IV

MEMBANGUN BUDAYA DAN INSTITUSI HAM

Tiap kelompok masyarakat mendefinisikan hak asasi manusia dengan cara yang agak berbeda, amat tergantung pada tradisi, budaya dan realitas kondisi perekonomiannya masing-masing. Namun kelompok-kelompok masyarakat tersebut—apapun nilai-nilainya—memerlukan wahana bersama, tempat individu, agensi pemerintah, institusi kemasyarakatan, serta berbagai macam kelompok lainnya dapat berkumpul untuk berbagi tanggung jawab demi kesejahteraan bersama dan menentukan aturan tentang perilaku dan kondisi yang dapat diterima.

Kita dapat menamakan ini sebagai masyarakat sipil (*civil society*), kita dapat pula menyebutnya sebagai domain publik (*public domain*). Inilah tempat di mana kita memiliki kesempatan untuk membangun budaya dan institusi-institusi yang menghargai hak asasi manusia. Di beberapa negeri - terutama di Barat - domain publiknya kuat, meskipun tidak sepenuhnya terbebas dari pelanggaran atau penyalahgunaan. Di masyarakat tertentu, domain publiknya sangatlah lemah; atau bisa jadi domain publiknya telah sedemikian diatur oleh negara. Di situ individu-individu sedemikian tertekan sehingga kemudian lebih memilih untuk menyingkir dan bersembunyi di dalam domain kehidupan privat mereka sendiri, daripada ikut menggelutinya. Tanpa masyarakat sipil ini, tanpa domain publik ini, tidak akan ada aktivitas warga yang signifikan. Di situ hak asasi manusia hanya akan menjadi suatu urusan yang ditangani secara sewenang-wenang.

Namun seperti yang akan kita lihat dalam Bab ini, kini kian banyak orang yang terlibat dan bekerja untuk memajukan dan melindungi hak

asasi manusia, baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Mereka menggunakan taktik-taktik baru untuk memperkuat domain publik tersebut dan berupaya membangun budaya hak asasi manusia yang kuat. Beberapa dari mereka memulainya dari ranah kecil - (seperti) di sekolah atau di level pemerintahan desa. Ada juga yang memfokuskan diri dengan mulai pada pemecahan satu masalah - namun ketika berhasil mencapai tujuan-tujuan sederhana, mereka kemudian mulai memiliki semangat dan keberanian untuk melakukan sesuatu yang lebih besar dan lebih baik. Dan di sinilah taktik-taktik baru dapat memainkan peran yang amat penting dan menentukan, yakni memberikan orang-orang, perangkat yang dibutuhkan untuk langkah-langkah ekstra tersebut.

Murat Belge

Presiden, Perkumpulan Warga Helsinki

Istanbul, Turki

Advokasi-advokasi HAM muncul dalam berbagai bentuk. Baik mereka yang bekerja untuk menangani kelaparan, membersihkan lingkungan hidup, atau untuk politik yang lebih transparan—baik dengan fokus pada anak-anak, perempuan ataupun kaum minoritas—benang merahnya adalah bahwa semua bekerja untuk membangun sebuah dunia, tempat tiap manusia dapat hidup secara bermartabat dan aman.

Berbagai perjanjian, konvensi dan traktat internasional yang telah ditandatangani pada beberapa dekade lalu merupakan suatu langkah yang positif, namun hanya dengan hal itu saja tentu tidak akan cukup. Individu-individu dan komunitas-komunitas perlu memahami hak-hak yang telah dikodifikasi dalam persetujuan-persetujuan itu—contohnya: hak atau kesamaan perlindungan di hadapan hukum, kebebasan bergerak atau kebebasan dari penyiksaan—dan juga cara menuntut hak-hak tersebut.

Taktik-taktik lain dalam Buku Acuan Kerja ini berfokus pada berbagai pelanggaran yang terus atau tengah berlangsung, atau pemulihan atas luka-luka dari penyalahgunaan di masa lalu. Taktik-taktik dalam bagian ini sebagian besar—merupakan pendekatan-pendekatan berjangka panjang—dengan cara memperkuat budaya dan penghormatan HAM. Mereka melakukan hal ini dengan cara mengajak orang-orang dan kelompok-kelompok baru untuk terlibat dalam kerja-kerja HAM, yang tidak hanya meningkatkan apa saja yang dapat kita selesaikan, namun juga menambah keabsahan dari gerakan-gerakan ini. Mereka melakukan ini dengan cara mengajak orang atau kelompok yang tepat secara bersama-sama. Orang-orang yang bergerak dalam hubungan kemitraan dan jaringan, akan dapat berbuat lebih banyak dibandingkan secara individual. Mereka melakukan ini dengan cara memberikan orang-orang, kemampuan yang dibutuhkan dalam pekerjaan mereka. Akhirnya, mereka melakukan hal ini dengan cara menciptakan sebuah kesadaran luas mengenai keberadaan hak-hak ini serta pelanggaran-pelanggaran terhadapnya; dan membujuk orang-orang untuk menyadari penyimpangan dan mendefinisikan penyimpangan ini sebagai sesuatu yang tidak bisa diterima dalam dunia beradab.

Beberapa dari taktik-taktik ini mengarah pada suatu masalah tertentu atau berfokus pada suatu hak tertentu, tapi banyak juga yang memiliki tujuan-tujuan lebih luas: membangun pekerjaan dasar, institusi, aliansi, kesadaran dan sikap-sikap yang memungkinkan perlindungan terhadap semua HAM.

Taktik-taktik di dalam Bab ini terbagi menjadi 4 bagian:

- (1) Taktik-taktik membangun konstituensi, dengan yang melibatkan kelompok-kelompok baru dalam advokasi HAM.
- (2) Taktik-taktik kolaborasi (kerjasama), yang dipakai untuk mengembangkan rekanan baru dan efektif demi terjadinya perubahan.
- (3) Taktik-taktik membangun kapasitas, seperti halnya membuat institusi-institusi dan sistem-sistem pelatihan untuk mengembangkan HAM.
- (4) Taktik-taktik pemahaman dan kesadaran mengenai pembelajaran HAM.

Membangun Konstituensi

Pesan-pesan HAM sering kali ditujukan kepada orang-orang yang sudah akrab dengan permasalahan HAM, yaitu orang-orang yang telah menunjukkan ketertarikan dan sokongan. Padahal menjangkau orang-orang baru dan melibatkan mereka dalam kerja-kerja HAM, akan memperkuat potensi-potensi bagi aksi-aksi yang lebih efektif. Hal ini akan mendatangkan energi-energi baru, gagasan-gagasan baru, sumber-sumber baru dan kontak-kontak baru. Semakin beraneka ragam kelompok orang-orang yang bertindak mengadvokasi sebuah kasus tertentu, semakin baik kemampuannya dalam menyesuaikan diri dengan perubahan, dan semakin sulit bagi para pelanggar HAM untuk mempertahankan aksi-aksinya. Sebuah konstituensi yang beraneka ragam dan aktif akan menciptakan gerakan HAM yang jauh lebih kokoh.

Taktik-taktik dalam bagian ini seluruhnya berupaya membangun konstituen-konstituen baru untuk persoalan-persoalan HAM. Taktik-taktik ini menjangkau individu-individu dan kelompok-kelompok yang

mungkin belum pernah memiliki kesempatan untuk terlibat dalam persoalan-persoalan ini—sebagai contoh, orang-orang muda atau legislator lokal—atau menjangkau mereka-mereka yang memiliki otoritas-otoritas khusus dalam suatu masyarakat, seperti halnya pemuka-pemuka agama yang memiliki pengaruh besar dalam mempengaruhi dan mengajak orang-orang lainnya.

Kawala Muda Menentang Fasisme dan Rasisme: menggunakan budaya pop untuk melibatkan orang muda dalam pemantauan HAM

Kelompok-kelompok diskusi, forum-forum dan lokakarya-lokakarya, kesemuanya ini merupakan perkakas umum untuk menimbulkan kesadaran terhadap suatu persoalan dan mengajak orang-orang baru supaya terlibat, tapi taktik-taktik ini mungkin tidak cukup dinamis untuk menangkap perhatian kelompok-kelompok target tertentu yang disebut kawula muda. Sebuah organisasi di Polandia mendapatkan hasil signifikan dalam menggunakan dua cara efektif untuk menjangkau kawula muda dan mendapatkan perhatian mereka, yaitu: musik dan olahraga.

Kelompok "*Nigdy Wiecej*" (baca: Jangan Lagi) memakai budaya pop untuk membangun sebuah jaringan muda-mudi anti rasisme di Polandia. Melalui konser *rock* dan pertandingan sepak bola yang mereka organisir, kelompok ini berhasil menjangkau banyak sekali kawula muda dan membuat mereka sadar akan masalah yang lebih besar. Kelompok ini kemudian merekrut beberapa anak muda itu untuk bergabung dalam jaringan korespondensi yang memantau dan melaporkan aktivitas-aktivitas kelompok neo fasis dan rasis di kota mereka masing-masing.

Sebagai bagian dari kampanye *rock* "*Music Against Racism*", *Nigdy Wiecej* mengatur konser-konser dan menerbitkan kepingan-kepingan CD kompilasi yang memuat musisi-musisi sohor baik dari Polandia maupun band-band *rock* kondang lainnya dari luar negeri. Pada saat konser dan di dalam kotak-kotak pembungkus kepingan CD, *Nigdy Wecej* mendidik para pemirsanya mengenai akut dan seriusnya permasalahan rasisme di Polandia dan menyerukan para penonton untuk bergabung sebagai agen aktif perubahan sosial.

Di masa lalu, stadion-stadion sepak bola Polandia hampir seluruhnya didominasi oleh sebuah sub kultur xenophobia (kecurigaan dan kebencian terhadap orang

asing), sebelum *Nigdy Wiecej* memulai kampanye “*Let’s Kick Racism Out of the Stadiums*”. Sebagai bagian dari kampanye, kelompok ini telah menerbitkan majalah “*Stadion*” (majalah anti rasis untuk para penggemar sepak bola) dan merilis sebuah CD, menyelenggarakan turnamen sepak bola amatir dan menyiapkan spanduk-spanduk dan selebaran yang digunakan selama pertandingan untuk menunjukkan kehadiran mereka pada kelompok-kelompok lokal anti rasisme lainnya.

Melalui kampanye yang berfokus kepada para kawula muda ini, *Nigdy Wiecej* telah merekrut sebuah jaringan kerja korespondensi 150 relawan, yang setiap bulannya bertugas melaporkan aktivitas-aktivitas rasis dan xenophobia di komunitas mereka. *Nigdy Wiecej* mengumpulkan laporan-laporan ini, menerbitkannya di dalam majalah bulanan mereka dan mendistribusikan majalah ini kepada penerbit di dalam negeri maupun internasional. Jaringan kerja dan publikasinya ini membantu memunculkan kesadaran terhadap masalah rasisme di antara sekian banyak komunitas Polandia secara lintas-sektoral, di luar para penggemar sepak bola dan musik *rock*.

Lihat lebih jelas tentang hal ini dalam catatan taktis yang tersedia di situs web <www.newtactics.org> dalam *Tools for Action*.

Nigdy Wiecej memakai budaya pop untuk membuat kawula muda (sebuah konstituen yang simpatik, namun kerap kali tidak/belum terlibat) untuk berkecimpung dalam kerja-kerja HAM, namun tidak berhenti pada arena konser dan olah raga saja. Sekali orang-orang menunjukkan ketertarikan dan komitmen untuk bekerja sebagai relawan, organisasi akan memastikan bahwa mereka memiliki kesempatan untuk lebih terlibat. Adaptasi dari taktik ini dapat digunakan untuk mengatasi apatisisme (ketidakpedulian) yang menyebar dalam berbagai situasi, namun (tetap) persoalannya itu sendirilah yang penting: yakni memastikan bahwa taktik ini dapat membuat orang-orang muda merasa terhubung, sesuatu yang berpotensi untuk menyentuh langsung kehidupan mereka sendiri.

Masalah-masalah sosial yang amat kentara seperti rasisme dan xenophobia sering kali selalu dibantah atau tidak diakui oleh pihak penguasa dan media massa mapan di Polandia, sama seperti di negara-negara Eropa Tengah dan Timur lainnya

*Rafal Pankowski
Nigdy Wiecej
Polandia*

Menjadikan HAM sebagai Persoalan Lokal: Menerapkan perjanjian-perjanjian internasional pada tingkat lokal untuk mempengaruhi kebijakan publik dan meningkatkan standar HAM

Para pembuat kebijakan lokal merupakan konstituen-konstituen yang berpotensi sangat kuat, namun jarang terlibat dalam perjuangan HAM. Di beberapa negeri, pegawai-pegawai lokal tidak dibiasakan untuk memikirkan pekerjaan mereka dalam bingkai HAM: pekerjaan mereka sehari-hari hanya berkutat sekitar keputusan, perizinan dan anggaran. *Women's Institute for Leadership and Development for Human Rights—WILD for HR* (Institut Perempuan untuk Kepemimpinan dan Pembangunan HAM) bekerja dengan pemerintah lokal untuk membantu para pegawai melihat peran yang dapat mereka lakukan dalam membentuk kebijakan-kebijakan pro HAM. mereka juga melibatkan komunitas-komunitas lokal, yakni konstituen-konstituen yang telah mempercayakan mandatnya kepada para pembuat Undang-Undang. *WILD for HR* telah menggunakan Konvensi PBB untuk Mengakhiri Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) untuk mengadvokasi HAM di level lokal.

Di tahun 1996, *WILD for HR* mulai mengadvokasi agar San Fransisco menjadi kota pertama di Amerika Serikat yang memberlakukan Undang-Undang yang mempromosikan prinsip-prinsip CEDAW. Organisasi ini mendiskusikan standar HAM berkaitan dengan diskriminasi serta menetapkan hasil-hasil terukur yang berpatok pada komunitas. *WILD for HR* bekerja dengan para pegawai-pegawai pemerintah, warga masyarakat dan kelompok-kelompok advokasi yang berfokus pada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kemiskinan dan berbagai problem kesehatan.

WILD for HR juga menyelenggarakan acara dengar pendapat publik di mana para warga peserta diyakinkan untuk merekam kesaksian-kesaksian pribadinya terkait dengan hak perempuan dan anak-anak-perempuan, serta tekad mereka untuk menegakkan prinsip-prinsip Konvensi. Melalui forum publik ini diharapkan dapat memberikan peran kepemimpinan kepada anggota-anggota masyarakat dan pegawai-pegawai lokal, serta membantu mereka merasakan keterlibatan langsung untuk memastikan prinsip-prinsip Konvensi diterapkan di San Fransisco.

Kesaksian tentang relevansi CEDAW dalam kehidupan perempuan-perempuan setempat dipresentasikan kepada pejabat-pejabat pemerintahan pada sebuah acara "dengar pendapat publik" di musim gugur tahun 1997. Pada bulan April 1998 kota ini mengesahkan sebuah peraturan daerah yang mengharuskan departemen-departemen kota untuk meninjau berbagai anggaran, kebijakan tenaga kerja, pemberian pelayanan dalam konteks jender dan HAM; serta mengalokasikan dana

untuk membantu penerapan peraturan baru itu di berbagai departemen. Peraturan daerah tersebut memasuki sebuah fase baru di tahun 2003.

Sebagai tanggapan terhadap peraturan daerah, Pemerintah kota San Fransisco telah memeriksa Departemen Pekerjaan Umum, Institusi Pengawasan Narapidana dan Anak Nakal, Departemen Lingkungan, serta Komisi Kesenian serta Departemen-Departemen kota terkait, untuk membuat sejumlah perubahan, dengan menyediakan lapangan kerja yang secara tradisional tidak dapat diakses oleh kaum perempuan dalam pemerintahan kota, serta memperbanyak fasilitas lampu penerang jalan di lingkungan warga yang rawan (tidak aman).

WILD for HR saat ini tengah memperluas jangkauannya dan menyarankan organisasi-organisasi di berbagai kota lainnya di Amerika Serikat tentang bagaimana kota-kota tersebut dapat mengadaptasi prinsip-prinsip CEDAW maupun CERD (Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Racial) .

Orang-orang yang memberikan kesaksian pada pertemuan publik tersebut mungkin belum pernah punya 'jam terbang' dalam hal HAM, sama halnya dengan para pejabat/pegawai-pegawai lokal di San Fransisco yang mungkin tidak pernah menyadari bahwa dalam pekerjaan sehari-hari mereka juga dapat menunaikan kewajiban-kewajiban HAM. Namun *WILD for HR* berupaya membantu mereka untuk mendudukkan pekerjaan dan pengalaman mereka ke dalam kerangka dan gerakan HAM.

Taktik ini mampu membantu mengubah suatu pola pikir nasional secara perlahan dan akhirnya mengarah pada penerapan dan pemantauan standar-standar HAM.

Kelompok-kelompok lainnya yang bekerja pada berbagai macam persoalan-persoalan, mungkin pula dapat mempertimbangkan bahwa mencari pendukung dan membangun konstituensi pada tingkat lokal, akan dapat menolong mereka membuat perubahan yang lebih signifikan, di tingkat lokal maupun global.

Melawan Stigma Sosial: Melibatkan para pemuka agama untuk menjadi model perilaku bagi warga yang terkena stigma

Di banyak komunitas, pemuka-pemuka agama memegang posisi yang sangat dihormati dan berpengaruh; masyarakat melihat mereka sebagai model dalam berperilaku dan standar moral yang harus ditegakkan. Di sini, rahib-rahib Budha

Tibet melawan stigma tentang HIV/AIDS dengan menunjukkan kepada biarawan/biarawati perilaku dan perhatian terhadap para penderita yang umumnya justru dikucilkan masyarakat.

Project Sangha Metta melatih biarawan/biarawati dan rahib-rahib baru Budha Tibet untuk memberikan pendampingan praktis maupun spiritual kepada para penderita HIV/AIDS serta untuk melawan mitos, miskonsepsi dan stigma-stigma di seputar penyakit ini. Program tersebut kini ada di Muangthai, Kamboja, Laos, Burma, Bhutan, Vietnam, China dan Mongolia, serta menerima bantuan dari UNICEF, AusAID, Open Society Institute dan The Burma Project. Sementara HIV/AIDS telah menjadi epidemi di wilayah Asia Pasifik, kekurangpahaman tentang penularan penyakit tetap eksis, sama halnya dengan diskriminasi terhadap mereka yang terinfeksi.

Berpusat pada pengajaran moral dan agama Budha, *Project Sangha Metta* sudah dimulai pada tahun 1997 oleh biarawan-biarawan Muangthai dan telah menjadi suatu sumber inspirasi, pelatihan dan pendampingan teknis untuk mobilisasi penganut Budha di seputar isu AIDS. *Sangha Metta* menyelenggarakan seminar-seminar, lokakarya-lokakarya dan kunjungan-kunjungan tempat perawatan penderita AIDS, bagi para pemimpin agama Budha, maupun dengan pemimpin agama-agama lainnya. Dalam pelatihan 3-5 hari ini, para partisipan belajar tentang pendidikan pencegahan, peningkatan-kesadaran, ketrampilan-ketrampilan manajemen sosial dan perangkat untuk mendorong toleransi dan belas kasih. Secara bersamaan mereka menilai masalah-masalah dalam masyarakatnya dan langkah-langkah yang mungkin dalam menanganinya.

Para pemimpin Budha kemudian mencontohkan perilakunya terhadap anggota-anggota masyarakat yang angkuh, misalnya dalam hal makanan, makanan disiapkan dan ditawarkan oleh orang-orang yang mengidap HIV/AIDS. Tindakan yang sederhana dan simbolik ini memiliki pengaruh yang kuat kepada anggota-anggota masyarakat dengan cara mempertentangkan ketakutan mereka akan penularan. Para biarawan juga mendampingi meditasi orang-orang yang mengidap HIV/AIDS, mengunjungi mereka di rumahnya masing-masing, mendidik orang-orang muda tentang penyakit dan merawat anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya karena penyakit ini.

Para biarawan dan biarawati yang bekerja bersama Sangha Metta, berupaya membantu untuk meyakinkan anggota-anggota komunitas untuk memajukan dan menghormati HAM dengan mencontohkan perilaku-perilaku penerimaan dan toleransi terhadap suatu kelompok orang yang telah dikucilkan. Kuil-kuil di

Asia merupakan jantung spiritual pedesaan dan para penduduk desa melihat para biarawan dan biarawati sebagai guru-guru yang dihormati, orang-orang terpercaya dan contoh atas jalan hidup Budha yang paling murni. Para warga kini telah terbiasa untuk melihat mereka sebagai contoh-contoh dalam berperilaku. Sementara hal ini mungkin tidak sejelas dalam agama dan budaya-budaya lain, banyak orang melihat pada para pemimpin agama mereka sebagai panutan mengenai bagaimana mereka seharusnya bertingkah laku. Para pemimpin ini memiliki kekuatan untuk melibatkan orang-orang baru dalam memajukan HAM.

Kini *Sangha Metta* telah melintasi batas agama/kepercayaan dan menyelenggarakan lokakarya-lokakarya dan pelatihan-pelatihan bagi para pemimpin agama Kristen, Hindu maupun penganut Islam.

***Bagaimana Anda dapat memobilisasi para pemuka masyarakat
di komunitas anda?***

*Saya berbicara kepada para biarawan
tentang pentingnya peranan mereka dalam menanggapi (persoalan) HIV/AIDS.
Saya mengajukan ide untuk mempelajari Kitab Suci Budha bersama mereka.
Mereka (kemudian) sampai pada kesimpulan
bahwa HIV/AIDS bukanlah suatu persoalan kesehatan yang sederhana,
namun juga (merupakan) persoalan sosio-ekonomis.
Sebagai pemimpin agama dan tradisional dalam komunitasnya,
para biarawan melihat peranan mereka untuk
memperkuat komunitas
dan memainkan peran aktif dalam memerangi HIV/AIDS*

Laurie Maund
Sangha Metta
Muangthai

Dari Pintu ke Pintu Mencari Sekutu: Menggunakan kampanye nominasi ‘kepahlawanan’ untuk mengidentifikasi sekutu potensial baru dalam HAM

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah sebuah persoalan yang mempengaruhi kehidupan banyak pria, perempuan dan anak-anak, (tapi) praktik-praktik ini masih kerap dilihat sebagai persoalan perempuan semata. Sebuah kelompok di Afrika Selatan menggunakan sebuah taktik untuk membuat kaum pria berpartisipasi dalam mengekang kekerasan dalam rumah tangga.

‘Kampanye Pahlawan Tiap Hari’ dari “5-in-6 Project” di Afrika Selatan menyerukan kaum perempuan untuk mengidentifikasi pria-pria dengan suatu sikap yang positif terhadap perempuan dan kemudian mengundang pria-pria ini untuk menjadi para penyokong baru bagi hak-hak perempuan.

Tingkat kekerasan terhadap perempuan di Afrika Selatan merupakan yang tertinggi di dunia (pada negara yang tidak sedang berperang). Penelitian menunjukkan bahwa satu dari enam pria di sini melakukan kekerasan terhadap perempuan dalam kehidupan sehari-harinya. “5-in-6 Project” menargetkan pada kelima pria selebihnya, yang tidak punya kebiasaan melakukan kekerasan terhadap perempuan. Project tersebut telah mengembangkan ‘Kampanye Pahlawan Tiap Hari’ untuk menemukan pria-pria ini dan melibatkan mereka dalam perjuangan. Para relawan pergi dari rumah ke rumah untuk menanyakan informasi kepada para perempuan mengenai keberadaan pria-pria yang baik dan positif di sekitar. Melalui pencalonan nama yang juga dikirim melalui surat, lebih dari 50.000 responden telah mengidentifikasi para ayah, paman, abang, kakek dan teman pria terbaik di negeri ini. Nama-nama dan bentuk-bentuk rekomendasi menghiasi gereja-gereja lokal, menyebarkan kesadaran tentang kampanye tersebut dan meningkatkan popularitasnya.

Para relawan yang berasal dari daftar nama-nama di atas, diundang untuk menghadiri pertemuan pembahasan tentang “Masalah Masyarakat” serta melibatkan para pria dari berbagai umur, pengalaman, kelas-kelas sosial dan situasi keuangan. Pertemuan ini berfokus pada usaha membangun solusi yang kolaboratif dan tanpa kekerasan untuk masalah kekerasan terhadap perempuan. Lokakarya-lokakarya tambahan membantu para pria memahami hubungan-hubungan kekuatan antar jender, membangun kepercayaan diri dan menemukan cara-cara yang positif dalam berurusan dengan situasi rumah tangga yang sulit. Banyak partisipan yang menyadari perubahan dramatis dalam kesadaran mereka tentang kekerasan dalam

rumah tangga, serta dalam kemampuan mereka untuk mengajak pria-pria lain dalam persoalan ini. Bagi kebanyakan dari mereka, ini adalah pertama kalinya mereka pernah berbicara tentang persoalan-persoalan ini dan hasilnya benar-benar kuat.

Dengan mengenali dan menghargai pria panutan lokal, “5-in-6 Project” mampu berhubungan dengan suatu contoh representatif pria panutan yang positif dalam komunitas, mengajak mereka berdiskusi dan mengidentifikasi solusi tentang kekerasan dalam rumah tangga, dan mengajak mereka untuk melihat bahwa terdapat suatu bagian yang tersembunyi dari masalah-masalah lain yang dihadapi oleh komunitas mereka.

Kampanye Pencalonan ini dapat menolong mengenali “sekutu potensial” - yaitu orang-orang yang peduli dengan suatu persoalan tertentu namun tidak terlibat aktif di dalamnya. Ketidakterlibatan mungkin karena mereka tidak melihat bahwa hal ini mempengaruhi mereka atau dikarenakan tidak adanya kesempatan bagi mereka untuk melakukan hal-hal itu atau juga dikarenakan masyarakatnya yang secara tradisional menjauhkan mereka dari persoalan-persoalan tersebut.

Sekali “5-in-6 Project” mengidentifikasi sekutu-sekutu pasif ini, ini juga membantu beberapa diantara mereka menjadi sekutu-sekutu aktif dan efeknya akan segera bertumbuh: Sekutu-sekutu aktif ini, memberikan perangkat dan informasi yang diperlukan, berbicara kepada sesama pria lainnya dan menghimpun lebih banyak sekutu untuk hak-hak kaum perempuan.

*Siapa sajakah sekutu pasif Anda?
Taktik apakah yang dapat digunakan
untuk mendapatkan dukungan
dan keterlibatan mereka?*

Membangun Jaringan Kerja Melalui Pesan Teks Singkat (SMS): Menggunakan pesan singkat untuk membangun pendukung aksi HAM

Teknologi Modern dapat digunakan untuk menciptakan kesadaran tentang HAM dan merekrut sejumlah besar orang, khususnya orang-orang muda, untuk terlibat dalam kampanye HAM.

Amnesty International (AI)-Belanda menggunakan teknologi pesan teks (SMS) untuk menarik perhatian anggota-anggota baru—khususnya orang-orang muda—kepada organisasi ini, AI-Belanda membangun kesadaran tentang “Kampanye Anti Penyiksaan” (*Campaign Against Torture*—CAT) dan mendorong orang-orang muda untuk melakukan aksi tanggapan yang cepat atas seruan-seruan mendesak yang dilancarkannya. Lebih dari 500 anggota baru telah bergabung sebagai hasil langsung dan rekrut melalui SMS. Lebih dari 5.000 orang lainnya telah merespon tawaran aksi-aksi mendesak melalui SMS.

Taktik ini dikembangkan pada tahun 2001, dalam kerangka kerja Kampanye Anti Penyiksaan *Amnesty International*. Ketika aksi-aksi mendesak sungguh diperlukan untuk melindungi seseorang dari ancaman praktik-praktik penyiksaan, seksi *Amnesty international* di Belanda mengirimkan sebuah SMS kepada nomor-nomor HP ribuan partisipannya. Partisipan-partisipan ini—yang telah mendaftar untuk menjadi relawan dan berlangganan jaringan kerja kampanye gratis (via) SMS—menanggapi seruan ini—dan dalam hitungan beberapa jam saja, *Amnesty* berhasil mengumpulkan ribuan tanda tangan protes menentang satu kasus atau ancaman penyiksaan. Organisasi ini kemudian meneruskan (SMS) protes ini kepada pihak yang berwenang, melalui faksimili atau surat elektronik (e-mail).

Bersama dengan seorang pria Tunisia yang telah difokuskan dan diuntungkan dari suatu Aksi Mendesak, AI-Belanda mengenalkan tekniknya pada acara program televisi Malam Minggu yang paling populer, (dan) mencapai 2,5 juta orang. Para penonton mempelajari bahwa suatu aksi mendesak (ternyata dapat) diringkas dalam 160 karakter pesan singkat SMS saja. Untuk menjawab, orang-orang hanya perlu menanggapi dengan “JA” (atau YA) kepada nomor SMS “4777”. Satu menit kemudian, para partisipan menerima SMS lainnya tentang ucapan terima kasih kepada mereka, serta informasi tentang berapa orang yang telah mengirimkan protesnya, dan sebuah SMS berikutnya akan menginformasikan mereka tentang hasil dari kampanye, seperti halnya pembebasan seseorang dari hukuman.

Walaupun *Amnesty International* jarang mengklaim tanggung jawab langsung dari peningkatan/perbaikan situasi dari orang-orang yang dimuat dalam kasus-kasus Aksi Mendesak, sekitar sepertiga dari kasus-kasus telah menjadi hasil-hasil yang sukses: hukuman mati telah diganti, orang-orang hilang telah hadir kembali dan kondisi orang-orang yang pernah ditahan/disekap telah diumumkan. Dengan hal ini, maka kesempatan-kesempatan untuk penyiksaan menjadi berkurang, dan kecenderungan para narapidana yang berpenyakit mendapatkan perhatian medis menjadi meningkat. Sebagai tambahan, kampanye juga telah mengajak banyak - bahkan mungkin ribuan - orang-orang muda untuk bergabung dengan Jaringan

kerja Aksi Mendesak dari *Amnesty International*.

Semua kampanye-kampanye *Amnesty* menargetkan suatu respon yang terfokus pada sebuah tempat di dunia dimana seseorang membutuhkan bantuan/pertolongan. Menggunakan aksi-aksi yang sederhana dimana sejumlah besar orang dapat berpartisipasi, dan melaluinya orang-orang ini (dapat) merasakan bahwa mereka juga (turut) membuat suatu perubahan. Kampanye-kampanye ini juga mendidik publik dan membangun suatu kesadaran global tentang pelanggaran HAM seperti penyiksaan. Kampanye SMS menyalurkan respon yang lebih cepat untuk menolong korban, sementara pada waktu yang sama hal ini juga mengembangkan pengaruh pendidikan *Amnesty* menuju sebuah konstituensi yang baru.

Kampanye SMS menarik perhatian banyak anggota-anggota muda pada *Amnesty* dalam hal cara-cara dimana aktivitas-aktivitas dan usaha-usaha lain tidak mampu melakukan apa yang dilakukan *Amnesty*. Orang-orang muda adalah pengguna telepon selular yang paling banyak dan paling sering, dan orang-orang muda inilah yang ingin dicapai oleh *Amnesty*. Dengan menggunakan perangkat populer dari kebudayaan anak muda ini, *Amnesty* melibatkan aktivis-aktivis muda yang akan menambah kekuatan kampanye untuk jangka waktu yang akan datang.

Mentransformasi Tugas Kepolisian: Pembelajaran aparat kepolisian tentang peran mereka dalam penegakan HAM

Sekelompok warga Brasil menggunakan sebuah pendekatan pelatihan yang menyeluruh dalam mengajak aparat kepolisian untuk mengubah hubungan mereka dengan masyarakat/komunitas-komunitas dimana mereka bekerja.

Centro de Assessoramento a Programas de Educao para a Cidadania—CAPEC (Pusat untuk Penasihat Program Pendidikan Masyarakat) menyediakan pelatihan untuk aparat-aparat kepolisian di Brazil untuk membantu mereka memahami peran vital yang dapat dimainkan sebagai pengawal HAM. Pelatihan, yang juga meliputi beragam pelatihan/teknik, menegaskan pentingnya perlindungan hak asasi segenap masyarakat, termasuk aparat kepolisian itu sendiri. Melalui proses ini peran kepolisian bisa ditransformasikan dengan meningkatkan hubungannya dengan masyarakat, serta keterlibatan masyarakat sendiri yang lebih aktif.

Catatan mengenai kebrutalan dan praktik-praktik penyiksaan pihak kepolisian sudah cukup lama dikenal di Brazil. Sebagai tambahan dari masalah yang satu

ini, aparat kepolisian sendiri memang hanya menerima gaji sangat kecil, sehingga praktik-praktik korupsi juga amat merajalela. Tujuan dari CAPEC adalah untuk menciptakan “keamanan interaktif”, di mana di dalamnya upaya keamanan publik direncanakan dan diatur bersama dengan anggota-anggota masyarakat, dengan tanggung jawab yang ditanggung bersama pula. Ini menghasilkan peran kepolisian yang secara efektif menanggapi kebutuhan masyarakat.

Kursus pelatihan ini diselenggarakan tiga kali dengan paket “modul untuk 2 hari” selama rentang periode 6 bulan. Agar semua pesan-pesan hasil pelatihan ini mampu mencapai sebanyak mungkin kalangan, CAPEC meminta departemen kepolisian untuk merekomendasikan aparat-aparatnya yang dapat berbagi pengalaman latihannya dengan sesama kolega lainnya, ketika mereka kembali bertugas. Para warga masyarakat juga ikut serta dalam kursus bersama dengan sejumlah aparat tersebut.

Pelatihan CAPEC ini berfokus pada upaya menunjukkan kepada para aparat mengenai pentingnya peran mereka di dalam masyarakat dan betapa pekerjaan mereka akan mempengaruhi kehidupan para individu dan masyarakat. Para aparat diminta untuk mengeksplorasi hal-hal yang mereka percaya dan rasakan selama bertugas, serta bagaimana sehari-harinya mereka berhubungan dengan orang lain. Mereka juga mempelajari tentang banyaknya keuntungan yang bisa diraih lewa keamanan interaktif, termasuk pula cara menjalani tugas kepolisian secara lebih efektif di bawah situasi-kondisi bertugas yang lebih aman bagi para aparat.

Para pelatih menggunakan banyak kisah, perumpamaan dan contoh-contoh menarik yang diambil langsung dari pengalaman-pengalaman para peserta pelatihan dan berfokus pada pembelajaran, alih-alih menghakimi satu sama lain. Dalam dialog ini, para aparat merasa dihargai serta dapat mempelajari bagaimana mereka dapat meningkatkan perlindungan HAM dalam masyarakat.

Pelatihan CAPEC sejauh ini telah digunakan di 25 kota di Brazil, dengan jumlah partisipan yang mencapai lebih dari 30.000 orang, utamanya berasal dari polisi sipil, polisi militer, polisi federal, polisi lalu lintas dan para penjaga gedung negara. CAPEC telah bekerja dengan pemerintahan federal, negara dan pemerintahan kota.

Taktik CAPEC ini menarik, khususnya karena taktik ini melibatkan sebuah kelompok yang bertanggung jawab untuk berbuat atau melakukan pembiaran atas pelanggaran-pelanggaran HAM; terlebih-lebih lagi dalam keberhasilan CAPEC mentransformasikan aparat menjadi kelompok yang turut mendukung penegakan HAM. Pendekatan ini tidak hanya berkontribusi pada budaya HAM yang semakin

kuat di Brazil. Hal ini juga secara langsung mengurangi penyimpangan yang tengah berlangsung dengan cara menciptakan suatu lingkungan yang nyaman, tempat polisi dan masyarakat dapat mencari solusi bersama untuk menghadapi persoalan-persoalan yang mereka hadapi.

Dalam berinteraksi dengan masyarakatnya, para aparat bisa menjadi pendidik, khususnya bagi orang-orang muda dan anak-anak yang bisa menjadikn mereka sebagai figur pahlawan atau panutan yang baik.

Ada satu episode di sebuah lingkungan tempat tinggal, khususnya di kota Macapá yang sangat menyentuh. Lingkungan tempat tinggal ini sebenarnya sangatlah berbahaya karena komplotan gank anak muda yang kerap menganiaya warga setempat.

Ketika kebijakan pemolisian interaktif diselenggarakan, ada seorang kapten polisi militer yang turut ditugaskan di area tersebut. Ia segera menemukan siapa yang menjadi pimpinan komplotan gank utama dan mengirimkan undangan kepada pimpinan gank ini untuk berbicara dengannya.

Akhirnya anak muda itu datang juga dan semenjak saat itu pihak aparat mulai membangun dialog dan ikatan perkawanan, sebagai seorang abang yang penuh perhatian, sekaligus sebagai seorang pendidik dan pemberi panutan.

Bisa jadi anak-anak malang itu memang belum pernah memiliki panutan apapun ketika meninggalkan rumah mereka. Semenjak itu, orang muda itu justru menjadi salah satu mitra ke polisian dan melalui kepemimpinannya, semakin banyak pula anak-anak muda lainnya yang turut membantu polisi. Lingkungan tempat tinggal ini kini menjadi semakin tenang dan aman.

Petugas ini memahami arti penting pekerjaannya sebagai pendidik dan penjaga perdamaian. Dengan semakin mendekatkan diri dengan masyarakatnya sendiri, ia mampu mendatangkan pengaruh positif.

Rosa Almeida
CAPEC
Brasil

Kerja Sama

Sekutu-sekutu baru—khususnya dengan pihak yang tidak terduga—kerap dapat memperkuat upaya pembelaan HAM dalam cara-cara yang semula tak disangka-sangka pula. Ajak seorang musuh lama ke sisimu dan Anda tidak hanya akan mendapatkan seorang sekutu, manun juga telah kehilangan seorang lawan. Bukalah jalur komunikasi yang telah tertutup dan Anda akan mengurangi potensi konflik dan pelanggaran HAM. Bangunlah hubungan dengan kelompok-kelompok di luar sektormu dan Anda akan mendapatkan ganjaran kepercayaan bagi keberlangsungan tujuan-tujuanmu dan memikat lebih banyak kalangan. Lampaulah batasan internasional dan Anda akan membangun sebuah kemitraan yang lebih kokoh, lebih fleksibel dan lebih memiliki efek secara politis.

Kerjasama yang strategis dapat membuat advokasi HAM menjadi lebih siap, lebih bertenaga dan lebih mewakili masyarakat yang diabdikan. Hal ini dapat memberikan mereka legitimasi di level arus utama (*mainstream*), di level media dan di dalam pemerintahan. Ketika para pembela HAM memiliki sekutu-sekutu yang andal dari beragam kelompok, serta tidak lagi bekerja secara terisolasi, maka kerja-kerja mereka akan jauh semakin sulit untuk dipatahkan.

Membangun Front Kesatuan: Membangun sebuah koalisi dengan organisasi HAM nasional untuk bersatu suara dalam menentang pelanggaran HAM

Ketika organisasi-organisasi HAM bekerja bersama, mereka kerap dapat berbuat lebih banyak untuk meningkatkan kondisi HAM di suatu negara, dibandingkan bekerja sebagai kelompok tersendiri saja. *Coordinadora Nacional de Derechos Humanos* (Koordinasi Nasional untuk HAM di Peru) membuktikan bahwa hal ini dimungkinkan, bahkan dalam skala yang sangat besar.

Coordinadora Nacional merupakan koalisi dari 63 kelompok HAM yang terkemuka. *Coordinadora* yang didirikan di tahun 1985, bisa bertahan karena kemampuannya untuk menghimpun organisasi-organisasi anggota dan beradaptasi di bawah lingkungan politik yang terus-menerus berubah. Percampuran anggota antara kaum perkotaan dan kaum pedesaan telah meningkatkan legitimasi kelompok, baik di lingkup nasional maupun internasional, sementara keterlibatan-

keterlibatan konstruktif aparat-aparat pemerintah telah menyumbang kekuatan bagi *Coordinadora* sebagai aktor politik. Berkuasanya rezim militer Jenderal Francisco Morales Bermudez yang disusul dengan kemunculan gerakan revolusioner bersenjata *Sendero Luminoso* (Jalan Bersinar), membuat organisasi-organisasi HAM kewalahan dengan meningkatnya aksi-aksi brutal (dari kedua belah pihak). Selama tahun 1983 dan 1984, sekitar hampir 6.000 orang Peru kehilangan nyawanya sebagai sebuah akibat dari praktik-praktik kekerasan politik tersebut. Adalah sangat penting untuk menciptakan sebuah ruang kerja sama bagi organisasi-organisasi HAM yang independen, baik dari segi agama maupun politik.

Kesuksesan dan kekuatan dari koalisi di Peru tergantung dari sejumlah faktor, yang meliputi:

- (1) **Prinsip yang jelas mengenai fungsi/pekerjaan internal:** Koalisi sudah memutuskan semenjak pertemuan pertamanya bahwa mereka bertekad untuk menolak segala bentuk kekerasan, menjaga independensi terhadap partai-partai politik maupun pemerintah, tetap berkomitmen untuk mewujudkan masyarakat demokratis dan menentang hukuman mati. Organisasi-organisasi yang tidak memegang prinsip-prinsip ini tidak diperbolehkan untuk menjadi anggota koalisi.
- (2) **Pengambilan semua keputusan dengan konsensus:** Proses pembuatan keputusan tercipta di bawah pengertian akan kesepahaman bersama dan solidaritas. Semua anggota kelompok harus setuju. Meskipun kelompok-kelompok dalam koalisi semuanya memiliki perbedaan dalam ukuran dan asal wilayah, setiap kelompok memiliki suara yang setara berkenaan dengan pembuatan keputusan dan pembentukan Dewan Pengurus Nasional, yang dipilih oleh para anggota dari Majelis Umum.
- (3) **Merepresentasikan kolektif:** Proses internal dari seleksi dan persetujuan terhadap perwakilan dari organisasi memberikan legitimasi—baik secara internal maupun eksternal—kepada orang ini dan kepada organisasinya. Ketika seseorang dipilih oleh organisasi-organisasi anggota untuk ikut serta dalam sebuah pertemuan internasional, maka sebagai contohnya, individu partisipan sudah bukan lagi perwakilan dari organisasi tertentu yang semula ia wakili, namun lebih merepresentasikan kepentingan *Coordinadora*.
- (4) **Kesepakatan mengenai prioritas yang akan dijalankan secara bersama-sama:** Setiap 2 tahun, para anggota organisasi berkumpul bersama dalam sebuah Majelis Nasional dan menentukan prioritas topik-topik yang akan mereka tetapkan sebagai prioritas koalisi. Pekerjaan mereka dalam topik-

topik ini kemudian akan diusung secara kolektif dan nasional oleh Sekretaris Eksekutif (sebuah badan permanen yang membawa keputusan dari Dewan Pengurus Nasional dan Majelis Umum). Sekretaris Eksekutif dipilih untuk masa jabatan 2 tahun dan bertugas sebagai juru bicara koalisi, mengatur dan memfasilitasi pertemuan serta memobilisir para anggota. *Coordinadora* hanya mengurus aktivitas yang berbeda dari hal-hal yang diterapkan oleh individu organisasi koalisi dan terkait dengan area-area prioritas.

Dengan mengoordinasikan perjuangannya, *Coordinadora* dapat memobilisir masyarakat secara efisien dan efektif pada skala nasional, memiliki suatu pengaruh yang jauh lebih hebat dibandingkan satu organisasi tunggal manapun atau sebuah koalisi temporer. Sebagai contoh, ketika Presiden Peru terdahulu Alberto Fujimori mengancam untuk membatalkan partisipasi Peru dari Sistem Peradilan Inter-Amerika, *Coordinadora* memobilisir anggota-anggotanya dari berbagai wilayah negara ini dalam waktu satu minggu. Semua anggota organisasi ini menandatangani pernyataan dan melakukan perjuangan menentang proposal presiden ini, dan lebih dari 400 organisasi tambahan telah memobilisir aksi. Setiap organisasi kemudian mengambil langkah-langkah dalam masyarakatnya sendiri untuk membangun dukungan dan mengajak rakyat berbicara lantang menentang proposal tersebut. Jika bukan karena posisi, kredibilitas dan struktur *Coordinadora* yang jelas, hal ini tidak akan mungkin. *Coordinadora* diciptakan dalam suatu atmosfer kekerasan dan pelanggaran HAM yang ekstrem, yang juga menunjukkan pada kita bahwa sangat mungkin untuk menerapkan taktik membangun koalisi bahkan dalam kondisi yang sangat buruk. Juga kesuksesan koalisi ini sejatinya didasarkan pada sesuatu yang lebih dari sekedar kebutuhan untuk berkumpul bersama pada saat yang sangat sulit. Adanya tujuan yang jelas, kerangka kerja dan prinsip kolaborasi yang solid dan pendirian yang jelas dalam menentang kekerasan, membawa organisasi ini mencapai legitimasi yang lebih hebat. Prinsip-prinsip ini juga telah memenangkan dukungan dari masyarakat internasional dan telah membantu memastikan keberhasilan koalisi tersebut dalam jangka panjang.

Dialog Publik dengan Aparat Kepolisian: Membangun sebuah forum publik berjangka panjang tempat warga masyarakat biasa dan aparat dapat bekerja sama untuk memecahkan berbagai masalah pelanggaran HAM maupun persoalan lainnya yang mempengaruhi hubungan polisi-masyarakat

Salah satu friksi sosial yang kerap berulang pada berbagai komunitas masyarakat adalah hubungan antara kesatuan polisi dengan warga sipil. Miskinnya komunikasi di antara ke dua belah pihak dapat mengarah pada tindak-tanduk pelanggaran maupun terganggunya keamanan publik. Di Nigeria, sebuah kelompok telah menemukan cara inovatif untuk menjembatani kesenjangan ini.

Yayasan *Centre for Law Enforcement Education*--CLEEN (Pusat Pendidikan Penegakan Hukum), merintis sebuah forum publik tempat warga masyarakat dan polisi dapat mendiskusikan berbagai keprihatinan dan keluhan tentang kasus-kasus tindak kejahatan maupun perilaku aparat kepolisian itu sendiri.

Kerap kali masyarakat dan aparat kepolisian dapat menemukan diri mereka berada dalam posisi maupun siklus ketidakpercayaan yang sangat tidak produktif. Sementara anggota masyarakat umumnya menyorot praktik-praktik salah dari kepolisian, seperti brutalitas dan korupsi; di sisi lain pihak kepolisian menganggap masyarakat cenderung bersikap bermusuhan dan tidak kooperatif terhadap tugas investigasi-investigasi yang mereka jalani.

Di Nigeria, struktur aparat kepolisian yang tersentralisasi telah ikut menyumbang permasalahan ini: paket agenda dan kebijakan seragam yang diterapkan di seluruh negeri, pada gilirannya menciptakan jarak antara prioritas polisi dalam penegakan peraturan dengan kebutuhan yang lebih spesifik pada masing-masing komunitas lokal.

CLEEN mulai menjembatani kesenjangan ini dengan mengirimkan surat kepada pemerintah lokal, mengusulkan penciptaan suatu forum publik di dalam komunitas mereka. Kelompok ini akan menindaklanjuti hal ini hanya jika pemerintah lokal juga menanggapi dan bersedia bekerja sama, serta adanya komitmen dari pihak kepolisian setempat yang dapat dipercaya. CLEEN kemudian akan memfasilitasi penyelenggaraan sebuah lokakarya kemitraan. Dalam lokakarya ini pihak kepolisian dan anggota komunitas menerima pelatihan resolusi konflik, mereka juga membahas tanggapan-tanggapan kepolisian terhadap keluhan-keluhan dari masyarakat lokal dan mendiskusikan bersama bagaimana program CLEEN dapat diterapkan di daerah tersebut. Lokakarya ini memungkinkan setiap anggota

komunitas untuk merancang program yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri. Setelah lokakarya, dua orang dari anggota komunitas kemudian akan dipekerjakan di markas polisi (secara paruh waktu) guna mengoordinir forum selama kurang dua tahun. Setelah periode dua tahun ini rampung, komunitas yang bersangkutan diharapkan dapat menemukan jalan untuk menopang operasionalisasi program ini secara swadaya.

Taktik CLEEN menyokong anggota-anggota komunitas dan aparat kepolisian dalam lingkungan yang tidak saling-mengancam—untuk meleluaskan kedua belah pihak dalam berbagai perhatian—berhasil menanggulangi hambatan-hambatan nyata di level birokrasi. Kedua belah pihak yang memiliki hubungan potensial untuk berkonflik, memiliki kesempatan untuk melihat sisi pihak lain secara lebih manusiawi: sebagai manusia yang dapat diajak berdiskusi dan bekerja sama, ketimbang sebagai musuh. Dengan berlalunya waktu, proses ini dapat menginterupsi siklus ketidakpercayaan yang tidak produktif, menerapkan sebuah dasar baru di mana polisi mengutamakan peran pelayanan mereka kepada warga dan warga mendukung polisi dalam menjalankan tugas-tugasnya. Hal ini dapat mengurangi praktik-praktik kekerasan polisi maupun tingkat kejahatan oleh para warga secara signifikan. Project ini telah diterapkan di 14 area pemerintahan lokal dari 6 wilayah geografis di Nigeria.

Iklim ketidakpercayaan dan kesalahpahaman yang kerap memicu perselisihan yang tidak perlu antar kelompok, dapat diatasi dengan taktik ini dengan membangun hubungan lebih erat antar kelompok yang berpontensi konflik, antar kelompok etnis maupun antar pemilik bisnis dengan petani. Satu problem yang cukup sulit ditangani adalah emosi dan kesengitan yang kerap melingkupi persoalan-persoalan sensitif. Para fasilitator harus dipersiapkan untuk menghadapi hal ini dan menanganinya selama periode waktu yang rata-rata cukup lama. Sebuah forum dialog yang berlangsung hanya sekali akan memiliki pengaruh kurang efektif, dibandingkan pendekatan jangka panjang yang dicanangkan CLEEN.

Mulailah dengan Mengenal Mitramu: Mengidentifikasi sekutu-sekutu potensial untuk menciptakan dialog membangun dan menjalin hubungan kerjasama

Kadang kala ketidakpercayaan tidak hanya muncul antara organisasi HAM dengan institusi di luarnya, namun juga antar sesama anggota dan di dalam tubuh organisasi HAM itu sendiri. Di wilayah Great Lakes di Afrika, sebuah kelompok

bekerja lintas-batas internasional dan garis kubu kecurigaan untuk menangani masalah ini untuk memantau situasi HAM di berbagai wilayah tersebut secara kooperatif dan membangun mekanisme penyebaran informasi dengan cepat.

Ligue des Droits de la Personne dans la Region des Grands Lacs--LDGL (Liga HAM untuk wilayah *Great Lakes*) bekerja sebagai sebuah kelompok payung untuk menaungi aliansi dari 27 organisasi anggota di Burundi, Republik Demokratik Kongo dan Rwanda, wilayah-wilayah yang selalu dilanda konflik. Wilayah *Great Lakes* sudah lama diterpa berbagai gelombang kekerasan yang dipicu ketidakpercayaan atau kebencian terhadap ideologi atau etnis tertentu. Berbagai organisasi di wilayah tersebut, bahkan beberapa organisasi HAM yang turut terjangkit imbas perpecahan ini, mengambil tindakan-tindakan berdasarkan konstituensi yang sempit (misal dengan berpihak pada etnis tertentu saja).

Proses dialog yang difasilitasi LDGL dilaksanakan secara berhati-hati dan sistematis dengan dilandasi prinsip-prinsip *ubuntu* (kemanusiaan) sebagai dasar interaksi dengan orang-orang dari latar belakang dan budaya yang berbeda, serta demi keberlanjutan dialog dan pertukaran informasi.

Ketika benih konflik justru menimpa aliansi LDGL sendiri, para pimpinan Liga berupaya untuk memahami akar masalah yang menimbulkan perselisihan ini. Mereka kemudian memetakan sekutu-sekutu potensial dan mengidentifikasi pendekatan dialog yang paling potensial untuk memelihara hubungan produktif. LDGL memilih individu-individu yang akan ikut berpartisipasi dalam dialog berdasarkan kemampuan mereka dalam membangun kepercayaan dan kerjasama. Dalam hal apa pun yang dikerjakannya, LDGL memilih bahasa dan tindakan yang dapat mengukuhkan kredibilitasnya. LDGL oleh karena itu, memastikan bahwa anggota-anggota aliansi melihat bahwa kepentingan-kepentingan mereka semua dihormati dan diperhatikan.

Sebelum menjajaki persoalan apa pun untuk dibahas di level aliansi (khususnya untuk persoalan yang mudah memancing perdebatan), Liga mengidentifikasi masalah maupun area perbincangan yang mungkin atau memang rentan mengundang perselisihan, menetapkan tujuan realistis yang diinginkan, serta keharusan bertindak bersama dalam aliansi sebagai satu-satunya cara untuk mencapai hal ini. Liga juga mengidentifikasi sekutu-sekutu yang pasif, potensial, maupun aktif untuk diajak bersama dalam dialog.

Perselisihan adalah hal yang jamak terjadi di antara anggota-anggota suatu perhimpunan, khususnya atas mereka yang bekerja di wilayah-wilayah berpotensi konflik tinggi pula. Alih-alih melihatnya sebagai kesalahan dari 'orang-orang

tertentu yang tidak baik', perselisihan ini menandai kebutuhan atas mekanisme dialog yang lebih tajam dan peka. Satu bagian yang sulit dari kerja-kerja Liga adalah mendapatkan pemahaman yang saling menguntungkan untuk aksi-aksinya dalam sebuah wilayah. Jika tidak tercapati konsensus pada saat pertemuan, Liga akan mengutus delegasi terpercaya dan diandalkan dari anggota organisasi aliansi kepada anggota-anggota aliansi lainnya yang enggan berkompromi, dalam rangka mendapatkan pemahaman dan perspektif yang lebih baik.

Melalui proses pembangunan dan pemeliharaan hubungan yang berkesinambungan ini, Liga tersebut telah berhasil dalam hal menciptakan sebuah jaringan kerja yang kuat dari berbagai organisasi di seluruh wilayah itu dan mendapatkan kepercayaan yang dibutuhkan dalam rangka memantau pelanggaran HAM dan menyebarkan informasi secara efektif.

Membuat mekanisme pemetaan secara hati-hati atas para sekutu sebelum memanggil anggota-anggota aliansi atau berbagai kelompok lainnya guna berdialog mengenai persoalan yang kontroversial, merupakan hal yang penting demi keberhasilan penerapan taktik. Taktik ini dapat diterapkan pada situasi lain, ketika kelompok-kelompok HAM terbelah dan saling berkompetisi satu dengan yang lainnya, demi perhatian dan sumber daya yang semakin langka. Aliansi mana pun pada hakikatnya sewaktu-waktu akan bisa menjadi renggang dan selalu membutuhkan dialog serta perawatan berkesinambungan, agar dapat terus bekerja efektif dan tetap bersama.

Pemantauan Jangka Panjang dan Intensif: Kontrak dengan perusahaan multinasional untuk memantau kondisi buruh di pabrik-pabrik pemasok

Coverco mengundang perusahaan-perusahaan multinasional untuk meningkatkan apresiasi HAM dengan cara membandingkan aturan tata kelola (*codes of conduct*) perusahaan mereka dengan praktik-praktik lapangan di berbagai pabrik pemasok barang yang jauh di seberang. Coverco mengumpulkan, memeriksa dan mempublikasikan informasi tersebut secara independen untuk menangkal segala pengecualian atau dalih kalangan bisnis atas kegagalan mereka dalam melaksanakan HAM.

Commission for the Verification of Corporate Codes of Conduct–Coverco (Komisi untuk Verifikasi Aturan Tata Kelola Perusahaan) melakukan pemantauan

jangka panjang yang intensif dan independen terhadap kondisi buruh di pabrik pakaian maupun industri ekspor agrikultur di Guatemala, memeriksa persetujuan dengan standar buruh yang diterima internasional. Coverco yang bermarkas di kota Guatemala, adalah sebuah organisasi pemantauan independen yang dibentuk tahun 1997 oleh para anggota kelompok-kelompok masyarakat sipil. Organisasi ini sendiri tidaklah bekerja sebagai sebuah konsultan ke manajemen, tidak pula sebagai sebuah organisasi advokasi pekerja. Organisasi ini pertama kali membangun hubungan dengan sebuah perusahaan (contoh: *Liz Claiborne Incorporated*—LCI), dari situ Coverco menegosiasikan kesepakatan dengan pihak LCI untuk mengizinkan akses penuh pemantauan (tanpa perlu minta ijin terlebih dahulu) terhadap berbagai fasilitas produksi, dengan kesepakatan bahwa pihak perusahaan berjanji untuk membayar biaya pelayanan ini. Coverco ini kemudian akan mempublikasikan hasil temuannya secara independen di situs webnya sendiri.

Alih-alih melakukan kunjungan singkat dan mengisi laporan insidental, Coverco justru mempertahankan kehadiran permanennya di pabrik, organisasi ini memantau dalam periode sedikitnya 6 bulan. Mereka bahkan mencoba untuk “membuat film” tentang hubungan buruh dalam suatu fasilitas produksi, ketimbang hanya mengambil cuplikan-cuplikan gambar. Para pemantau Coverco sering mengunjungi pabrik-pabrik beberapa kali dalam sebulan, tanpa pemberitahuan sebelumnya. Para pemantau mengevaluasi rekaman/laporan pabrik, meminta pihak manajemen untuk menjelaskan kebijakan perusahaan mengenai permasalahan yang tengah berkembang, melakukan inspeksi sensorik¹ (*sensory inspection*) atas fasilitas produksi, menemui para pekerja di tengah jam kesibukan jam kerja maupun setelah jam kerja. Coverco juga menjaga sebuah saluran telepon khusus untuk memastikan bahwa para pekerja memiliki akses penuh kepada mereka. Wawancara dilakukan dalam bahasa Spanyol dengan tetap menjaga kerahasiaan narasumber. Akses yang penuh terhadap fasilitas produksi, berkas-berkas staf personil, manajemen dan para pekerja dijamin oleh perusahaan multinasional.

Pemantauan dimulai dengan suatu “audit sosial” di mana para pengawas menginvestigasi hubungan para buruh terhadap fasilitas-fasilitas produksi – seperti contoh, memeriksa apakah terdapat suatu prosedur yang kurang adil dan apakah hal ini telah berlaku. Kondisi kerja didokumentasikan dengan cermat, meliputi keberadaan dan penanganan bahan-bahan kimia industri, pemeliharaan dan akses terhadap kamar mandi, perawatan kesehatan di tempat kerja dan pemenuhan standar kesehatan dan keselamatan lainnya.

1 Pemeriksaan langsung dengan menggunakan pancaindra atas yang meliputi pemeriksaan fasilitas produksi

Pemantau kemudian mulai membuat sebuah ringkasan cermat tentang catatan bukti-bukti pembayaran, pembayaran keuntungan pekerja dan bonus produksi serta pemenuhan aturan lembur. Secara berhati-hati, mereka menginvestigasi keluhan-keluhan pekerja dan membuat beberapa untuk di masukkan dalam komentar manajemen pada semua laporan, mencatat situasi di mana tuntutan tidak dapat dibuktikan/diperiksa.

Aktivitas pemantauan dan pemeriksaan Coverco mendorong perusahaan untuk pada gilirannya, mensyaratkan pihak pemasok untuk melakukan pemenuhan sistemik atas hak-hak buruh. Sebagai contoh, seorang buruh remaja yang bekerja pada perusahaan pemasok untuk Liz Claiborne, mengeluh bahwa manajernya menolak untuk mengijinkannya pulang kerja lebih awal untuk menghadiri kelas-kelas seperti yang diwajibkan baik aturan-aturan lokal maupun aturan tata kelola dari LCI. Ketika Coverco mendokumentasikan pelanggaran ini, LCI ikut turun tangan bersama manajemen lokal agar dapat memastikan bahwa manajer mematuhi hukum ini. Peristiwa ini memicu Coverco untuk meninjau berkas-berkas para buruh remaja yang bekerja di pabrik, pemasok itu kemudian bertindak untuk memastikan bahwa mereka memiliki syarat perijinan orang tua dari semua pekerja anak/remaja, dan mematuhi hukum setempat yang mewajibkan para buruh anak/remaja untuk bekerja tidak lebih dari 35 jam per minggu.

Coverco juga melaporkan beberapa masalah dalam mendapatkan akses kepada pabrik pemasok, maupun keengganan beberapa pemasok untuk menerapkan program perbaikan yang telah dinegosiasikan Coverco dengan perusahaan multinasional. Misalnya saja, sekali waktu manajer di salah satu pabrik pemasok GAP, menolak akses pemantauan dari Coverco untuk berjalan melewati fasilitas produksi tanpa kawalan atau berbicara langsung dengan para buruh tanpa kawalan pihak perusahaan.

Walaupun aktivitas pemantauan Coverco ini jauh dari sempurna, tapi kegagalan penerapan program perbaikan akan dapat berakibat pada turunnya peringatan keras atau bahkan pemecatan manajer terkait oleh pihak pabrik pemasok. Para buruh yang diberhentikan secara ilegal banyak yang telah dipekerjakan kembali, lembur yang berlebihan juga telah dikurangi dan kasus-kasus kesalahan pembayaran keuntungan telah diperbaiki.

Berbagai pemantauan dengan jenis yang berbeda tengah mulai marak di seluruh dunia, termasuk pendekatan-pendekatan lainnya yang lebih konfrontatif. Mereka—seperti halnya Coverco—melibatkan kerja sama dengan berbagai perusahaan lainnya. Coverco mempergunakan taktik hubungan kerjasama dengan

kalangan bisnis internasional, ketimbang memosisikan mereka sebagai musuh. Coverco menegosiasikan prospek pendanaan program pemantauan external dan independen ini dengan cara yang menarik, dengan mengedepankan keunggulan yang akan diraih dibandingkan dengan pemantuan konvensional. Mekanisme ini menyediakan jalur aman bagi para buruh untuk melaporkan keluhannya tanpa khawatir akan sanksi balik, sehingga meyakinkan segenap pihak berkepentingan untuk turun tangan memperbaiki kondisi kerja yang ada. Coverco juga mempekerjakan pemantau-pemantau lokal, yang lebih mengenal kondisi lokal dan mudah menjalin relasi dengan para buruh lokal, dibandingkan orang asing. Untuk membuat taktik ini bekerja, sangatlah penting untuk memiliki dukungan baik dari kalangan buruh maupun pihak manajemen. Ketika hal ini berhasil, semua pemangku kepentingan akan ikut andil dalam menciptakan budaya taat hukum.

Pemerintahan-Swadaya Lintas Batas: Menciptakan sebuah badan transnasional untuk mengadvokasi dan mempromosikan hak-hak masyarakat asli

Kadangkala sekutu potensial bisa kita lihat dengan jelas, namun kita tidak memiliki cara efektif untuk menghimpun mereka. Masyarakat asli *Saami*, yang hidup di empat negeri berbeda di Lingkaran Benua Artik, telah membangun badan-badan pemerintahan yang saling berkoordinasi satu sama lainnya, lintas batas negeri untuk mendukung kebijakan lintas-nasional berkenaan dengan hak-hak suatu minoritas—khususnya untuk mengusung hak-hak yang secara langsung berdampak pada kehidupan mereka sehari-hari.

Dewan *Saami*, didirikan pada tahun 1956, lahir dari kebutuhan untuk memelihara hubungan kuat yang melintasi perbatasan beberapa negeri yang membagi orang-orang *Saami* dari Skandinavia Utara, serta mempromosikan kerjasama dan perlindungan hak-hak mereka sebagai masyarakat asli. Dewan ini mengadvokasi hak-hak tersebut di wilayah pemukiman orang-orang *Saami*—yang telah hidup di sana semenjak lebih dari 10.000 tahun lalu—di sebuah wilayah yang melintasi 4 negeri: Norwegia, Swedia, Finlandia dan Semenanjung Kola di Rusia.

Anggota-anggota Dewan *Saami* dicirikan dengan keterlibatannya dalam Organisasi Nasional *Saami* di negeri-negeri tempat mereka tinggal. Kelima-belas kursi Dewan dibagi secara proporsional berdasarkan populasi *Saami*—yang totalnya mencapai lebih dari 100.000 di setiap keempat negeri tersebut. Dewan ini telah memberikan dukungan yang kuat bagi terbentuknya Parlemen *Saami* di negeri-

negeri Skandinavia, yang telah didirikan di Finlandia tahun 1973, di Norwegia dan Swedia pada tahun 1987 serta 1993 secara berurutan. Masing-masing parlemen bersifat independen, sebuah badan yang dipilih secara demokratis yang berkonsultasi dengan parlemen nasional terhormat dalam hal kepentingan terhadap orang-orang *Saami*. Walaupun Parlemen *Saami* tidak dapat meloloskan perundangan mereka sendiri, namun mereka memiliki kapasitas mengajukan inisiatif di hadapan parlemen-parlemen nasional ketiga negeri.

Kesuksesan dari Dewan *Saami* dapat disematkan pada kemampuannya untuk mengatur orang-orangnya secara terus-menerus, baik pada tingkat lokal, nasional maupun internasional. Dengan cara ini para anggota mampu untuk menggunakan ikatan lintas-batas mereka untuk membangun konstituen dan pengaruh demi suatu perubahan kebijakan lokal; sementara secara bersamaan menarik organisasi-organisasi lokal yang lebih kecil untuk memberikan dukungan koordinasi transnasional yang lebih besar atas persoalan orang-orang *Saami*. Satu upaya yang saat ini sedang berlangsung adalah merencanakan Konvensi Warga *Saami* di wilayah Nordik. Di tahun 2002, pemerintahan dan parlemen *Saami* di Norwegia, Swedia dan Finlandia setuju untuk membangun suatu kelompok para ahli yang terdiri dari anggota warga *Saami* maupun Non-*Saami*, untuk membuat rancangan Konvensi di tahun 2005. Konvensi ini akan berurusan dengan persoalan-persoalan mendasar tentang hak menentukan nasib sendiri dan hak atas tanah, sepadan dengan lingkungan, kerjasama antara negara dengan parlemen *Saami* serta mempertahankan warisan budaya. Satu wilayah perhatian yang mendesak adalah hak melintas batas wilayah untuk menggembala, bagi para peternak rusa kutub mereka— sebuah mata pencaharian utama masyarakat *Saami*.

Sebagai tambahan, Dewan *Saami* merupakan penolong dalam membangun *Permanent Forum on Indigenous Issues* pada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan memainkan suatu peranan yang berpengaruh dalam pembuatan laporan *Special Rapporteur on Human Rights for Indigenous People* di bawah UNHCHR—United Nations Commissioner for Human Rights (Komisioner Tinggi PBB untuk HAM).

Sebagai sebuah kaum minoritas di negeri mana pun tempat mereka tinggal, badan politik *Saami* yang terpisah akan memiliki tenaga yang lebih kecil untuk membentuk kebijakan-kebijakan yang berdampak pada mereka. Namun secara bersama-sama, mereka dapat memperkuat kekuatan mereka dalam mengadvokasi hak-hak asasi manusia – suatu contoh yang jelas tentang nilai dari sebuah kerja sama. Hal ini juga akan mempromosikan hak asasi manusia pada tingkat lokal, sementara tetap mempengaruhi keputusan institusi nasional, regional dan institusional. Kolaborasi yang serupa dapat berjalan efektif di situasi lainnya di

mana kelompok-kelompok berkepentingan atau kasus-kasus kelompok HAM yang melampaui batas-batas nasional, kian sering terjadi.

Kami coba menggalang hubungan kerja yang baik dengan pemerintahan setempat (asal), walaupun tidak berkompromi untuk hak-hak kami. Kami tetap menjaga dialog berkesinambungan dengan pemerintah. Kami juga selalu mencoba untuk lebih terinformasikan dan lebih paham akan berbagai persoalan dibandingkan dengan orang-orang pemerintahan yang kami ajak bernegosiasi.

*Mattias Ahren
Kepala Unit HAM,
Dewan Saami*

Mendidik Generasi Berikutnya: Berkolaborasi dengan pihak pemerintah untuk mengintegrasikan gagasan pendidikan HAM ke Sekolah Umum

Sekolah umum dapat menjadi ajang penting untuk membangun budaya HAM. Di Albania, ada sebuah kelompok yang bekerja dengan pemerintah untuk mempersiapkan warga negaranya dalam pembangunan demokrasi di sebuah negara bekas satelit Soviet Rusia.

Albanian Center for Human Rights–ACHR (Pusat Albania untuk HAM) berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan Albania untuk menghantar pendidikan HAM ke semua sekolah umum di negara ini. Kelompok ini mengambil momentum periode transisi pasca komunis, dengan melakukan negosiasi bersama pihak aparat pemerintahan yang pro-demokrasi dalam rangka meluncurkan sebuah paket pendidikan jangka panjang dan cukup ambisius, guna mempersiapkan warga-warga Albania muda untuk bergabung dan berpartisipasi secara penuh dalam demokrasi.

Di tahun 1991, setelah 45 tahun berada di bawah kebijakan isolasi era kediktatoran komunis, Albania menghadapi tantangan prospek dunia baru yang lebih demokratis, dengan segunung warisan permasalahan sosial-politik, ekonomi serta infrastruktur institusional yang masih sangat memprihatinkan. Untuk memberikan andil terbaik

bagi prospek demokrasi baru mereka, Albania membutuhkan sistem pendidikan yang dapat mempersiapkan warga-warganya berpikir kritis dan mendorong partisipasi politik seluas-luasnya.

ACHR mengembangkan sebuah rencana ambisius untuk mengintegrasikan pendidikan HAM ke dalam kurikulum negara di semua sekolah-sekolah umum. Organisasi ini mengambil keuntungan dari momentum politik unik pemerintahan peralihan pasca komunis, untuk memastikan diperolehnya komitmen tertulis dari Departemen Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Albania untuk menerapkan project pendidikan HAM di sekolah-sekolah umum.

ACHR kemudian mulai membangun project percobaan, menyelenggarakan sesi-sesi pelatihan akbar untuk sebuah kelompok inti guru-guru sekolah. Mereka mengadaptasi materi-materi pendidikan HAM internasional untuk ruang kelas Albania dan mengembangkan buku-buku aktivitas untuk setiap jenjang pendidikan. Mereka juga menyelenggarakan project sekolah percontohan, di mana guru-guru inti dan administratornya membantu melatih guru-guru lainnya perihal hak asasi manusia dan sejarahnya, lengkap dengan mekanisme internasional dan metodologi HAM serta aktivitas-aktivitas di dalam dan di luar ruang kelas.

Pada akhir dekade '90-an, ACHR telah mengembangkan materi kurikulum khusus dalam banyak bidang untuk semua kelompok usia, melatih ribuan guru untuk menggunakan materi-materi itu, mengatur 42 sekolah percobaan di seluruh negara dan memprakarsai sebuah kurikulum perguruan tinggi keguruan untuk mengintegrasikan tema HAM ke dalam persiapan ajar mereka.

ACHR memiliki sebuah visi yang ambisius untuk Albania dan menggunakan momentum politik strategis untuk mengubah visi itu menjadi kenyataan. Dengan cerdas mereka mengidentifikasi kebutuhan sebuah pemerintahan yang tengah berada pada masa transisi dan berkepentingan untuk menunjukkan dedikasi HAM ke hadapan masyarakat internasional (Albania sudah meratifikasi Konvensi tentang Hak-hak Asasi Anak-anak di tahun 1993). ACHR menawarkan pemerintah sebuah jalan untuk menuju komitmen itu dan membantu memenuhi kewajiban negara di bawah Konvensi tersebut, dan dengan cara itu pula ACHR berhasil memastikan kerjasamanya. ACHR juga berhasil mempertahankan momentum tersebut dengan mendatangkan arus dukungan internasional dan pakar-pakar pendidikan.

Membangun Kapasitas

Sumber daya bagi para praktisi HAM senantiasa terbatas. Kami selalu berupaya untuk berbuat lebih di bawah kondisi kekurangan—dengan orang-orang yang lebih sedikit dan dana yang kurang dan dalam waktu yang juga kurang—dari yang sesungguhnya benar-benar kami butuhkan. Namun ada satu sumber daya penting yang benar-benar dapat diperbaharui, yaitu: keahlian atau kemampuan kita. Ketika kita memperluas kemampuan kita dan para kolega kita—dan bahkan membawa kemampuan itu keluar dari komunitas dan membaginya dengan orang-orang baru—sebenarnya kita sudah dapat berbuat sesuatu yang lebih dengan segala kekurangan dan waktu yang terbatas pula. Taktik dalam sesi ini berupaya membangun kapasitas melalui dua jalan penting: taktik-taktik ini memberikan praktisi-praktisi HAM, kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan untuk membuat kerjanya lebih baik dan lebih cepat, dan memberikan orang-orang yang normalnya berada di luar kerja HAM, keahlian yang dibutuhkan untuk memajukan hak asasi manusia.

Mempromosikan Profesionalisme dan HAM: Memnbangun sebuah organisasi profesional penyedia dukungan dan pelatihan untuk membangun profesionalisme di antara aparat penegak hukum

Di Liberia, para aparat penegak hukum melihat kebutuhan untuk meningkatkan penghormatan terhadap HAM di kalangan mereka sendiri.

Liberia National Law Enforcement Association—LINLEA (Asosiasi Penegak Hukum Nasional Liberia) menyokong profesionalisme di antara personil penegak hukum. LINLEA menganjurkan perspektif bahwa para aparat penegak hukum adalah pelindung dan pendukung HAM utama, sebagaimana tercantum di dalam kode etik penegakan hukum dan etika kepolisian. Aturan-aturan ini menantang aparat untuk menghormati hak-hak dasar atas kebebasan, persamaan dan keadilan. Sayangnya, dikarenakan minimnya pelatihan, ketidaksiplinan, kepemimpinan yang lemah atau manipulasi yang kronis, personil penegak hukum kerap terlibat dalam tindakan-tindakan tidak profesional yang mengarah pada pelanggaran HAM. LINLEA didirikan untuk memenuhi kebutuhan aparat kepolisian atas pelatihan, advokasi

dan bimbingan, agar pada gilirannya mereka dapat bergabung dan berpartisipasi aktif.

Untuk membentuk LINLEA, sejumlah aparat kepolisian yang terpandang mengundang tokoh-tokoh masyarakat serta departemen penegakan hukum terkait (pidana maupun perdata) dan perwakilan-perwakilannya agar berpartisipasi dalam pendirian sebuah komite pengatur. Komite ini mengembangkan rancangan organisasi dan mengangkat jajaran direksi. Menteri Kehakiman menghadiri peresmian asosiasi baru tersebut, serta menambah legitimasi asosiasi ini. Sejak saat itu, asosiasi ini mengembangkan beraneka-ragam pelayanan untuk anggota-anggotanya, termasuk pelatihan mengenai kepolisian dan prosedur-prosedur investigasi, HAM dan kepemimpinan, juga mekanisme untuk meningkatkan pelaksanaan standar profesional seperti prosedur pelayanan, penerimaan pengaduan. Sebagai tambahan, asosiasi mencapai jaringan kerja di luar penegakan hukum, bekerja sama dengan komunitas-komunitas dan organisasi-organisasi pembela HAM lainnya di Liberia.

Para anggota memberikan investasi pribadi masing-masing di dalam organisasi dengan membayar iuran anggota. LINLEA kini telah berkembang menjadi sebuah jaringan kerja lebih dari 500 personil penegak hukum, mewakili hampir 20% dari kesatuan polisi, dengan banyak anggota dari institusi penegak hukum lainnya. Pusat Penelitian dan Pendidikan Sistem Peradilan LINLEA telah memberikan pelatihan kepemimpinan dan HAM kepada 223 aparat senior penegak hukum. Organisasi ini juga telah menyelenggarakan suatu lokakarya pelatihan-untuk-pelatih (*training-for-trainers*) untuk para pelatih dan spesialis kurikulum dari perwakilan penegak hukum, juga sebuah lokakarya dalam formulasi dan pengembangan kebijakan perencanaan dan administrator penegak hukum.

Asosiasi mengadakan acara sosial tahunan yang memperkuat ikatan di antara anggota-anggota dan keluarga-keluarga mereka, serta menggelar forum-forum publik untuk membangun hubungan antara penegak hukum dan masyarakat. Asosiasi ini juga memberikan pelayanan terus-menerus yang menguntungkan para personil penegak hukum, mencakup sertifikat untuk keikutsertaan dalam lokakarya pelatihan, yang dapat menolong mereka untuk menerima promosi (kenaikan jabatan/pangkat); menyokong kebutuhan-kebutuhan mereka atas peningkatan dalam struktur penegakan hukum; pendampingan dan beberapa perlindungan atas masalah-masalah profesional seperti pemecatan dan penugasan yang keliru; dan beberapa pendampingan ketika menghadapi masalah-masalah pribadi seperti kesulitan keuangan sampai pada pengurusan kematian atas sanak-saudara di keluarga masing-masing.

Banyak organisasi telah memperkenalkan program-program pelatihan untuk aparat penegak hukum. Pendekatan LINLEA, sebagai sebuah organisasi profesional, membutuhkan investasi waktu, uang dan usaha dari para aparat kepolisian sendiri. Taktik ini menambahkan insentif dalam praktik-praktik kebiasaan kerja profesional—kebiasaan yang menunjukkan penghargaan bagi HAM—yang timbul dari dalam dan bukan hanya sekadar tuntutan dari luar profesi. Dorongan ini sangat penting dalam membangun kekuatan organisasi yang dibutuhkan, untuk menyokong para personil penegak hukum yang hendak meningkatkan perilaku mereka sendiri, serta menyokong pengaruh-pengaruh positif untuk merubah perilaku mereka yang cenderung melanggar norma-norma profesional. Karena mereka adalah para aparat penegak hukum sendiri, para pengurus LINLEA itu sendiri pertama-tama dituntut untuk memiliki pemahaman yang mendalam mengenai tantangan yang dihadapi para personil penegak hukum dan berbagai ragam dukungan yang akan mereka butuhkan.

Mengadakan Akses Sistem Peradilan di Daerah Pedesaan: melatih para pemimpin lokal sebagai mediator dan narasumber HAM

Di banyak area pedesaan atau perkampungan, akses kepada sistem peradilan dan pelayanan penyelesaian konflik benar-benar terbatas. Sebuah kelompok di Uganda bekerja untuk mengubah hal ini dengan cara melatih kemampuan mediasi bagi warga setempat.

Di Uganda, *Foundation for Human Rights Initiative*—FHRI (Yayasan untuk Inisiatif HAM) melatih para pemimpin lokal untuk membantu anggota-anggota masyarakat dalam mengajukan tuntutan hukum, dengan maksud menghindari masalah-masalah dan frustrasi dalam menggunakan sistem peradilan resmi. FHRI mengajarkan para pemimpin ini cara-cara untuk mendidik komunitas perihal Konstitusi dan HAM. Yayasan ini juga memberi mereka ketrampilan paralegal, memungkinkan mereka untuk memberikan mediasi, penyuluhan dan konsultasi sehingga warga masyarakat dapat memperoleh ganti rugi atas pelanggaran-pelanggaran hak dan melatih pemenuhan hak-hak asasi mereka.

Banyak orang di pedesaan Uganda tidak sadar atas hak-hak dasar mereka maupun tindakan-tindakan yang perlu diambil ketika hak-hak tersebut dilanggar. Mereka juga merasa bahwa sistem peradilan yang ada sedemikian tidak terjangkau, oleh karena peyanan hukum tersebut berpusat di kota. Di sisi lain proses hukum

yana ada mensyaratkan biaya yang sangat besar serta memakai bahasa dan kebiasaan yang tidak lazim bagi mereka.

FHRI memilih partisipan yang telah menunjukkan kemampuan memimpin dan dipandang sebagai sosok penting di dalam komunitasnya, seperti para guru, pemimpin bisnis, para tetua adat atau para pekerja kesehatan. Pelatihannya merupakan sebuah kurikulum seminggu-lamanya yang memusatkan perhatiannya pada proses peradilan, metode-metode diskusi dan cara-cara untuk membuat jaringan komunikasi. Pelatihan ini juga menyokong partisipan dengan ketrampilan-ketrampilan yang dibutuhkan untuk memantau, mendokumentasikan serta melaporkan pelanggaran-pelanggaran HAM. Beberapa relawan bertanggung jawab atas kelompok-kelompok khusus di komunitasnya, seperti kelompok perempuan, anak, manula atau lainnya.

Ketika mereka menyelesaikan rangkaian pelatihannya, para relawan paralegal ini membentuk pusat pertemuan yang menangani masalah dengan cara-cara yang sesuai dengan komunitas mereka. Hal ini mendorong solusi-solusi alternatif – seperti penyuluhan, mediasi, penyerahan kepada organisasi yang ada dan saran dalam (bentuk) prosedur organisasi – sehingga orang-orang dapat terhindar dari penolakan dan biaya-biaya tinggi yang disyaratkan dalam sistem peradilan formal di kota.

Kini FHRI telah melatih lebih dari 1000 relawan paralegal dan menerbitkan Paralegal Reference Handbook (tersedia di FHRI).

Taktik ini meningkatkan akses pada keadilan. Dan ketika ada begitu banyak permintaan bagi pelayanan hukum/HAM datang dari luar sebuah komunitas, taktik ini juga menciptakan advokat-advokat lokal untuk hak-hak ini (*Thongbai Thongpao Foundation* di Muangthai juga memfasilitasi pendidikan hukum bagi warga wilayah perkampungan, namun lebih berfokus pada mendidik anggota komunitas yang mungkin membutuhkan pelayanan hukum, ketimbang menyelenggarakan pelatihan bagi para pemimpin lokal untuk menyediakan sendiri pelayanan hukum tersebut. Pendekatan FHRI dapat dipergunakan dalam situasi lainnya ketika jalur hukum bukanlah sebuah pilihan untuk masyarakat dan ketika pemimpin komunitas setempat berkeinginan dan mampu menjalankan peran ini.

Kesuksesan dari taktik ini tergantung pada jaminan bahwa para pemimpin yang dikenal dari luar memiliki otoritas moral yang tinggi di komunitasnya dan bersedia menggunakannya bersamaan dengan kemampuan mediasi yang telah dipelajarinya. Pelatihan-pelatihan jangka pendek juga perlu didukung dengan program dukungan lanjutan berjangka panjang.

*Apakah taktik sejenis ini
diperlukan di komunitas anda?
Siapa saja tokoh atau pemimpin lokal
yang bersedia dilatih
untuk mengungkap taktik ini?*

Membantu Advokat HAM Menjadi Lebih Efektif: Memanfaatkan spesialis dan sistem informasi untuk membantu advokat HAM bekerja lebih efektif

Para Praktisi HAM kerap dapat diuntungkan dari taktik-taktik penguatan yang menyediakan ketrampilan-ketrampilan, teknologi dan sistem organisasi yang baru.

Human Rights Center (Pusat HAM) di Universitas Sarajevo berfokus pada meningkatkan akses informasi untuk advokasi HAM. Anggota-anggota staf di Pusat HAM tersebut telah membangun sebuah sistem informasi yang kuat dan memberikan peran sentral bagi seorang spesialis informasi. Penggunaan sistem dan kemampuan spesialis ini telah memungkinkan para staf lainnya untuk lebih baik dan lebih produktif dalam memberikan fokus pada inti misi programatis mereka.

Membangun sebuah perpustakaan atau unit dokumentasi dalam organisasi HAM dapat membantu staf memfasilitasi aliran informasi, mengatur dokumen-dokumen rahasia, menyimpan rekaman tentang sejarah organisasi dan meningkatkan pelaksanaan (kegiatan) hari demi hari. Elemen pokok dari taktik ini meliputi keterlibatan seorang pustakawan ahli atau spesialis informasi, sebuah ruangan fisik yang tertata rapi, sebuah koleksi utama materi-materi dan perangkat lunak yang sesuai, serta perangkat teknologi informasi lainnya.

Pustakawan HAM memiliki ketrampilan-ketrampilan tertentu untuk ditawarkan pada sebuah organisasi HAM, termasuk pengetahuan teknologi dan informasi serta dokumentasi HAM. Peran Pustakawan adalah untuk mengadakan dan mengevaluasi materi-materi yang berhubungan dengan misi inti organisasi, menatanya sedemikian rupa untuk memudahkan penggunaan dan penyebarannya di dalam organisasi. Peran terakhirnya ini mensyaratkan kerja erat dengan staf untuk memilah dan memprioritaskan informasi.

Adalah penting untuk memiliki ruang yang cukup untuk mengatur materi-materi serta untuk kebutuhan interaksi staf. Secara minimal, sebuah pusat dokumentasi mencakup ruang untuk kebutuhan kantor pustakawan, termasuk sebuah komputer

yang terkoneksi pada jaringan (*networked computer*) dan papan rak dan tempat penyimpanan berkas. Koleksi pokok buku-buku dan sumber-sumber lainnya tergantung pada misi dan skala organisasi. Pada umumnya, sebuah organisasi seyogianya mencoba untuk mencakup segenap isi penting informasi demi program organisasi saat ini di waktu mendatang.

Baca lebih tentang hal ini dalam sebuah buku catatan taktis di situs web <www.new.tactics.org> di dalam *Tools for Action*.

Kerja pustakawan di Pusat HAM di Sarajevo berpusat pada kebutuhan informasi atas advokasi-advokasi HAM itu sendiri, yang memungkinkan mereka menjadi lebih efektif dan efisien dalam waktu dan tenaga mereka. Pusat HAM ini adalah sebuah organisasi yang cukup luas dengan performa dukungan keuangan yang cukup baik, namun hampir semua kerja HAM saat ini bergantung pada akses berjangka-waktu untuk melengkapi dan mencermati informasi. Ketika sebuah organisasi memiliki sumber-sumber yang perlu – sekalipun hanya melibatkan sesaat pekerja paruh-waktu dan relawan yang berdedikasi – sebuah pusat informasi dapat membantu menyediakan akses itu. Pustakawan dan spesialis informasi itu sendiri, bagaimanapun, mungkin perlu untuk menggunakan taktik-taktik pendekatan untuk meyakinkan organisasi dan anggota-anggotanya tentang pentingnya pekerjaan yang mungkin pada saat awal terlihat seperti kerja sampingan belaka, dihadapkan pada inti misi organisasi.

*Saya membawa kembali taktik dari pusat HAM
yang saya tentu tahu akan berguna.
Kemudian saya menghabiskan beberapa jam
bersama staf administrasi untuk membicarakan hal ini.
Sebelumnya perpustakaan kami benar-benar berantakan
dan perlu 3 bulan penuh
untuk menata-ulang dan melakukannya dengan benar.
Ini memang pekerjaan besar,
orang-orang bekerja keras sepanjang musim panas.
Hasilnya amat banyak membantu saya*

Bea Bodrogi
NEKI,
Hungaria

Menyiarkan Berita HAM: *Melatih korban pelanggaran HAM menggunakan teknologi video untuk mengangkat kisah pelanggaran-pelanggaran tersebut*

Para praktisi HAM sering kali amat membutuhkan agar pesan-pesan mereka

menjangkau masyarakat yang lebih luas. Di era teknologi canggih masa kini, peningkatan kebutuhan ini mensyaratkan akses yang baik pada video dan teknologi penyiaran, serta ketrampilan-ketrampilan pendukung untuk melakukan hal ini.

Black Box Foundation—BBF (Yayasan Kotak Hitam) yang bermarkas di Hungaria dan Romania, bekerja untuk meningkatkan apresiasi terhadap minoritas keturunan gypsy (*Rom*) dengan melatih mereka dalam produksi program-program televisi untuk saluran-saluran TV lokal. Yayasan ini membuat tim produksi, melatih mereka dalam produksi video, memesan waktu siaran dan memastikan bahwa program-program ini saling dipertukarkan di antara tim-tim tersebut.

Sejak tahun 1997, BBF telah melatih kurang lebih 150 orang gypsy pada 12 lokasi di Hungaria dan Romania untuk menginformasikan para pemirsa lokal mengenai persoalan-persoalan yang berpengaruh atas komunitas mereka. Yayasan ini membutuhkan aplikasi dan membuat tim-tim campuran-etnis yang masing-masing tim terdiri atas 5 orang. Pertama, anggota-anggota staf bekerja untuk membangun hubungan saling percaya dengan dan di antara para anggota tim, mendiskusikan sudut pandang individu dan menunjukan persoalan-persoalan sensitif yang akan dibawa ke dalam program tayangan. Tim-tim ini kemudian belajar dasar-dasar produksi televisi dan disamping itu juga berkonsultasi dengan para pakar sosial mengenai berbagai aspek problem masyarakat minoritas.

Selama tiga hari terakhir masa pelatihan, berbagai tim itu mulai memproduksi film-film pertama mereka. Yayasan menyediakan perangkat kamera, lampu, mikrofon maupun peralatan-peralatan lainnya yang dibutuhkan. Tim-tim ini berlanjut dengan memproduksi program-program bulanan pada stasiun-stasiun televisi lokal, bekerja secara independen dan dengan sumber-sumber mereka sendiri, sementara yayasan bernegosiasi untuk menjamin waktu siaran reguler untuk program-program tersebut. Yayasan memantau dan mendampingi tim-tim ini selama 6 bulan pelatihan dan tim-tim saling bertukar produksi video di antara mereka.

Hasil yang dicapai oleh tim-tim produksi tersebut sangatlah bervariasi. Beberapa tim bisa melanjutkan penyiaran secara reguler di televisi-televisi lokal, sementara yang lainnya menggunakan kemampuan dan peralatan-peralatan mereka untuk merekam aktivitas organisasi mereka.

Sukses dengan pendekatannya, BBF kemudian membuka sebuah sekolah paket satu-tahun yang cukup berhasil bagi para pelajar gypsy yang berminat menjadi praktisi penyiaran profesional.

Program BBF telah membantu mengubah cara minoritas dipandang dan

diperlakukan di wilayah tersebut, cukup berhasil mengurangi diskriminasi dan prasangka yang telah lama berlangsung. Di Hungaria dan Rumania, orang-orang *gypsy* kerap dipisahkan dari populasi mayoritas dan masalah-masalah mereka disembunyikan. Mereka kerap tidak diberikan akses pada pendidikan dan sumber-sumber daya lainnya yang boleh dinikmati populasi mayoritas. Program BBF tidak hanya memberikan kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan para partisipan untuk mengangkat kisah-kisah mereka sendiri – orang-orang *gypsy* – namun juga membantu mengangkat kisah-kisah mereka ke hadapan kelompok menengah dari populasi mayoritas, yang tidak keberatan untuk menyaksikannya. Hal ini amat membantu membangun sebuah budaya yang memungkinkan populasi minoritas dan mayoritas bekerja bahu membahu mempromosikan HAM untuk semua.

Mendokumentasikan Penyiksaan: Membentuk sebuah jaringan kerja profesional untuk mendokumentasikan penyiksaan dan mendukung para korban

Sebuah kelompok di Kenya membentuk jaringan antar dokter-dokter dan pengacara-pengacara dalam rangka mengangkat praktik-praktik pelanggaran HAM oleh agen-agen penegak hukum, serta untuk membangkitkan kesadaran anti penyiksaan.

Independent Medico-Legal Unit–IMLU (Unit Medis-Hukum Independen) sebuah organisasi non pemerintah yang terdaftar, adalah sebuah jaringan kerja dokter dan pengacara yang memberikan pelayanan kepada para korban dan keluarga-keluarganya. Pelayanan ini termasuk pemeriksaan forensik (pasca kematian – *postmortem*) secara independen atas kematian-kematian yang diduga akibat perbuatan para aparat penegak hukum. Unit ini juga mendokumentasikan dugaan kasus-kasus penyiksaan, memberikan bantuan hukum serta pelayanan kesehatan bagi para tahanan dan para penyintas praktik-praktik penyiksaan.

Pada awal kelahirannya IMLU terlebih dulu merintis jaringan kerja dengan melancarkan berbagai *lobby* bagi terbentuknya beberapa komite profesional, antara lain: *Kenya Medical Association Standing Committee on Human Rights* (Panitia Kecil HAM dari Asosiasi Medis Kenya) serta sebuah komite pengacara yang bersimpati terhadap upaya penghentian praktik-praktik penyiksaan. Setelah komite-komite ini terbentuk, IMLU menyelenggarakan berbagai lokakarya lanjutan untuk memperkuat kapasitas para tenaga kesehatan dan pengacara dalam berhadapan dengan praktik-praktik penyiksaan. Lokakarya ini diselenggarakan di seluruh wilayah negeri,

dengan topik-topik seperti: mendefinisikan HAM, membangun hubungan baik bersama departemen yang terkait dengan Lembaga Pemasyarakatan (Penjara) dan mendidik para profesional dan pegawai-pegawai pemerintah mengenai berbagai statuta HAM dan pelanggaran-pelanggarannya.

Untuk menjangkau para korban penyiksaan dan keluarganya, IMLU menggalang kerjasama dengan beraneka-ragam badan keagamaan, pengacara, dokter dan organisasi non-pemerintah di seluruh Kenya. Para klien yang telah terdaftar dapat meminta sebuah pemeriksaan *postmortem* atas anggota keluarganya, di mana hasilnya nanti akan didokumentasikan secara berhati-hati sesuai standar kelayakan medis dan hukum.

Ketika bukti-bukti penyiksaan ditemukan, IMLU mendorong para kliennya untuk mencari bantuan hukum yang tepat. Sementara bagi klien-klien yang tidak sanggup mengusahakan bantuan hukum, IMLU menghubungkan mereka dengan jaringan pengacara dan organisasi-organisasi non-pemerintah yang menyediakan pelayanan hukum gratis (*pro bono*). Tujuannya adalah untuk mengangkat kasus-kasus kepentingan umum ke hadapan publik, yang diharapkan akan menjadi contoh perlawanan terhadap praktik-praktik penyiksaan dan mengirimkan pesan ini kepada para pelaku penyiksaan.

Karena upaya IMLU yang berkesinambungan dalam mengangkat persoalan-persoalan penyiksaan di Kenya, beberapa kasus telah dibawa ke pengadilan. Hal ini menghasilkan peningkatan perhatian bagi keamanan dan perlakuan terhadap para tahanan. Lebih jauh lagi, otoritas lembaga pemasyarakatan (penjara) saat ini telah menunjukkan minat lebih serius atas kondisi penjara yang lebih baik, dengan mengurangi praktik penggunaan hukuman fisik atau siksaan dan—sejak pemerintah baru mulai berjalan di akhir 2002— lebih banyak aparat pemerintah yang mulai bekerja bersama dengan IMLU guna meningkatkan upaya-upaya peningkatan standar HAM mereka sendiri.

Dengan mengoordinasikan sebuah jaringan profesional dan pelatihan untuk mendokumentasikan praktik-praktik penyiksaan, IMLU telah membangkitkan kesadaran tentang problem penyiksaan di Kenya, yang berujung pada meningkatnya tekanan terhadap pemerintah untuk mencegah praktik-praktik keliru ini. Jaringan kerja ini juga mewujudkan aspirasi kalangan dokter dan pengacara untuk menggunakan kemampuan terbaik mereka demi meningkatkan HAM, memperkuat dukungan di seluruh pelosok negeri demi mengakhiri praktik-praktik penyiksaan.

Akan tetapi berbagai inisiatif ini, tidaklah berjalan sedemikian mulus tanpa tantangan. Permintaan atas pelayanan IMLU sering kali melebihi kapasitas logistik

dan pendanaannya, guna mendukung para korban. Padahal korban-korban di daerah pedesaan Kenya sering kali harus menghadapi kenyataan tanggapan lambat dari jaringan para pengacara, yang kebanyakan bermukim di Nairobi. IMLU juga pernah mengalami intervensi dan intimidasi dari kalangan aparat kepolisian dalam upayanya untuk mendokumentasikan pemeriksaan *postmortem*. Dalam kasus-kasus seperti ini, IMLU yang juga tergabung dengan organisasi non-pemerintah lainnya akan mengikat persoalan-persoalan ini dengan cara menyebarkan pernyataan tertulis kepada publik lewat media/wartawan, untuk mengancam berbagai tindak intervensi tersebut dan juga dalam rangka mengajukan upaya hukum atas tindak-tindak aparat-aparat yang intimidatif.

Mata dan Telinga HAM: Memperkuat berbagai organisasi non pemerintah (ornop) untuk menggunakan video dalam advokasi HAM

WITNESS mendorong organisasi-organisasi HAM di seluruh dunia untuk mengintegrasikan video sebagai alat advokasi dalam kerja-kerja mereka. Beranjak dari pertimbangan mengenai kekuatan kesaksian-kesaksian perorangan serta keyakinan bahwa 'sebuah gambar bernilai seribu kata', produksi video dari WITNESS dan mitra-mitranya telah dipergunakan:

1. sebagai alat bukti dalam proses hukum,
2. untuk mendukung penuntutan suatu pelanggaran HAM,
3. untuk melengkapi laporan tertulis kepada organisasi-organisasi di level regional dan internasional, guna menyediakan suatu laporan tandingan yang sepadan terhadap versi resmi negara mengenai laporan penyelenggaraan HAM di negara tersebut,
4. untuk merangsang pendidikan dan mobilisasi masyarakat akar rumput,
5. untuk menyediakan informasi bagi penyiaran berita,
6. untuk mempromosikan HAM melalui internet, dan
7. untuk menghasilkan program dokumenter bagi penyiaran televisi berskala dunia.

Berdiri di tahun 1992 dan bermarkas di New York City, sebagai sebuah lembaga WITNESS telah menciptakan kemitraan dengan lebih dari 150 kelompok di 50 negara dalam beragam persoalan, meliputi "pembersihan sosial" atas anak-anak jalanan di Amerika Tengah, pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak-anak gadis selama perang saudara di Sierra Leone, sampai pada kondisi buruh di pabrik-

pabrik kecil (dan tidak manusiawi) di Amerika Serikat, maupun kondisi rakyat Burma yang terusir dari negaranya sendiri (Myanmar).

WITNESS memilih mitra-mitra yang ingin membangun kapasitas jangka panjang untuk menggunakan video secara efektif dan juga mengupayakan kesempatan kampanye khusus di mana video dapat membalikkan keseimbangan antara kesuksesan dan kegagalan kampanye. Begitu kemitraan terbentuk, WITNESS menyediakan mitra lokal tersebut dengan perangkat video dan pelatihannya, kemudian ditindak-lanjuti dengan lokakarya mengenai teknik-teknik penggunaan kamera, instruksi yang intensif mengenai penggunaan video untuk kerja-kerja HAM, evaluasi sistematis atas rekaman video, pendampingan pasca-produksi (*post-production*), serta timbal-balik saran/masukan yang membangun untuk membuat karya dokumenter yang lebih kuat.

WITNESS dan mitranya kemudian membuat kampanye advokasi video seputar rekaman yang berhasil dikumpulkan. Kampanye ini mencakup banyak komponen, termasuk panggung penyiaran dan distribusi, kerjasama dengan organisasi dan jaringan kerja lainnya, pertunjukkan terarah di hadapan penonton kunci dan membuka kesempatan bagi para penonton individual untuk turut memberikan kontribusinya masing-masing. Sebagai pengguna produk WITNESS peran mereka mungkin sama pentingnya, baik dalam menggunakan video untuk mempengaruhi sebuah kelompok kecil yang penting dalam pembuatan keputusan, atau kadang-kadang hanya untuk memobilisir kaum remaja seputar persoalan-persoalan tertentu saja. Berbagai rekaman video juga tersimpan di arsip WITNESS tersedia pula untuk komunitas global sebagai sumber-sumber daya yang unik seputar informasi HAM.

WITNESS menyadari bahwa suatu advokasi HAM—yang amat tergantung pada faktor konteks lokal—mungkin ‘nasibnya’ akan lebih terlindungi atau justru semakin terancam dengan penggunaan sebuah kamera. WITNESS menggunakan pengalaman para staf dan berbagai mitranya untuk menolong orang lain dalam pembuatan kebijakan-kebijakan yang aman dan pantas bagi situasi-kondisi mereka. Hal ini juga mensyaratkan pentingnya kepercayaan di antara orang-orang yang membuat film dan orang-orang yang dijadikan obyek film, serta perlunya pemaparan yang jelas mengenai resiko dan keuntungan berbicara di hadapan sebuah kamera.

Bukti Visual untuk Menghentikan Pelanggaran

Mitra-mitra WITNESS telah mengumpulkan berbagai kesaksian dan menghasilkan karya video yang kuat, yang telah ditayangkan dalam berbagai cara. Salah satu

pemakaian strategis dan aman dari advokasi video adalah kerja WITNESS dengan *Mental Disability Rights International*—MDRI (Lembaga Hak-hak Kaum Penyandang Gangguan Mental) untuk mendokumentasikan kondisi-kondisi memprihatinkan di dalam lingkungan Rumah Sakit Psikiatri di Paraguay.

Julio dan Jorge adalah dua anak laki-laki remaja yang ditahan di dalam rumah sakit bersama dengan 458 orang lainnya. Mereka dalam keadaan telanjang, di balik sel yang tak tertutup, tanpa akses pada kamar mandi. Sel ini amat dipenuhi bau urin dengan bercak-bercak kotoran tinja di tembok. Remaja laki-laki ini menghabiskan waktu sekitar 4 jam tiap hari lainnya di sebuah kandang terbuka, dikotori dengan sampah dan kaca-kaca pecah.

Pada bulan Desember 2003, MDRI memenuhi suatu petisi darurat di hadapan Inter-American Commission on human Rights—IACHR (Komisi Inter-Amerika tentang HAM) pada Organisasi Negara-negara Amerika (Organization of American States—OAS) meminta IACHR untuk turun tangan demi kepentingan remaja yang malang itu, begitu pun dengan mereka-mereka lainnya yang ada di rumah sakit tersebut.

Bersama dengan kiriman laporan hukum singkat, MDRI mengajukan sebuah tayangan video (yang telah disunting bersama dengan WITNESS) dan dibuat terstruktur sesuai dengan pasal-pasal terkait dengan sejumlah instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi Paraguay. Laporan yang dipresentasikan dalam kerangka HAM ini memberikan ruang pendapat, bahwa para pasien secara legal berhak atas perlindungan hak-hak hidup dan perlakuan yang manusiawi. Dengan menggunakan rekaman video yang menunjukkan secara jelas betapa Paraguay telah gagal memenuhi kewajibannya sebagai sebuah negara, video itu mengangkat wajah manusia atas begitu banyak kasus HAM serupa.

Hal ini menuntun IACHR, untuk pertama kalinya, menyetujui ukuran penting perlindungan jiwa dan integritas fisik bagi orang-orang yang berada di dalam institusi psikiatris, sebuah contoh yang dapat digunakan di wilayah-wilayah negara lainnya. MDRI dan WITNESS kemudian membawa persoalan tersebut ke level publik dengan cara menyiarkan video melalui jaringan situs mereka dan bekerja sama dengan CNN en Espanol pada sebuah program dokumenter bersambung. Bahkan tidak kurang dari Presiden Paraguay dan Menteri Kesehatan sendiri mengunjungi rumah sakit tersebut, yang berujung pada pemecatan atas Direktur Rumah Sakit dan dibentuknya sebuah komisi untuk menyelidiki persoalan ini.

Dengan mengemukakan situasi tersebut kepada publik luas, MDRI dan WITNESS telah mengundang perhatian dunia atas kondisi mengerikan dari fasilitas kesehatan

mental yang dikelola negara, serta mengumpulkan dukungan lebih banyak orang demi perubahan. Pihak media juga memainkan peran penting dalam membongkar peristiwa-peristiwa ini, yang telah membantu mendatangkan perubahan penting.

Walaupun bagian ruang Julio dan Jorge masih dalam pengerjaan renovasi ketika buku ini dicetak, mereka tidak lagi dikunci dalam sel kecil, dan kini mereka sudah memiliki akses untuk mandi dan berganti pakaian, ditambah fasilitas perawat 24 jam. Menteri Kesehatan Paraguay tengah bekerja sama dengan Organisasi Kesehatan Pan-Amerika (Pan-American Health Organization—PAHO) untuk meningkatkan integrasi komunitas orang-orang dengan cacat mental.

Kerjasama antara WITNESS dan MDRI telah menghasilkan perubahan sistem, namun tantangan masih membentang di depan, untuk memastikan bahwa advokasi HAM dengan mengambil momentum yang diciptakan oleh video dapat ditindaklanjuti kasusnya, untuk memastikan bahwa orang-orang dengan ketidakmampuan mental tetap mendapatkan dukungan dan layanan yang diperlukan demi keberhasilan integrasi ke dalam masyarakat.

Sementara kasus ini bersandar pada bukti visual yang kuat mengenai sebuah pelanggaran, adalah penting untuk mencatat bahwa mitra-mitra WITNESS secara sukses telah menggunakan video tanpa bergantung pada tambahan gambar-gambar grafis. Sebagai contoh, banyak yang telah membuat video-video kuat dengan cara mengumpulkan kesaksian-kesaksian dan menuturkan kisah para korban, yang kesemuanya ini dapat memiliki dampak yang sama kuatnya dalam kampanye HAM.

Apakah Pemerintah Tetap Memegang Janji-Janjinya? Membuat sebuah jaringan kerja relawan pemantau untuk meyakinkan pemerintah lokal dan nasional untuk mematuhi komitmen HAM Internasional

Di Slovakia, sebuah kelompok memantau kepatuhan pemerintah pada komitmen HAM internasional dan menggunakan apa yang ditemuinya untuk meyakinkan pemerintah untuk tetap pada janji-janjinya.

League of Human Rights Advocates—LHRA (Liga Advokasi HAM) di Slovakia telah mengembangkan sebuah jaringan relawan pemantau HAM dari populasi minoritas orang-orang *gypsy (Rom)* untuk memastikan bahwa perjanjian HAM internasional diterapkan pada tingkat lokal. Sebagai bagian dari syaratnya untuk menjadi salah satu anggota Uni Eropa, Slovakia harus meratifikasi sejumlah traktat

HAM internasional dan sangat rentan terhadap kritik atas catatan HAM mereka. Sebagai tambahan, melampaui peraturan Undang-Undang lainnya, Konstitusi Republik Slovakia sendiri telah memberikan prioritas pada perjanjian HAM Internasional yang telah diratifikasi dan diadopsi sebagai Undang-Undang oleh parlemen.

Pendekatan pemantauan LHRA membantu menjembatani kesenjangan antara tempat pelanggaran dan kebijakan, hukum dan perjanjian yang dibuat untuk mencegah atau menghentikan pelanggaran HAM. Sering kali, satu-satunya diskusi mengenai pelanggaran HAM serta hukum atau kebijakan terkait hanya terjadi di level politik tingkat tinggi atau forum diplomatik saja. Untuk itu LHRA merekrut orang-orang dari kalangan yang dianggap sebagai warga kelas dua selaku pemantau-pemantau HAM. Para pemantau tersebut belajar—seringkali merupakan pengalaman pertama kalinya—mengenai hak-hak mereka sendiri di bawah hukum nasional dan internasional. Dari situ mereka kemudian bekerja untuk LHRA guna menerapkan hak-hak itu di gedung-gedung pusat kota, kantor-kantor polisi, sekolah-sekolah maupun berbagai komunitas mereka sendiri. Informasi dari para pemantau lokal ini digunakan untuk memperkenalkan efek hukum-hukum nasional dan internasional yang benar-benar terjadi di sebuah negara.

Para pemantau dari keturunan *gypsy (Rom)* tersebut direkrut melalui mulut ke mulut. LHRA mendidik mereka tentang instrumen-instrumen HAM yang relevan dan tanggung jawab otoritas pemerintah untuk menerapkannya, kemudian mengatur pertemuan perkenalan dengan pihak kepolisian, para walikota, para pemimpin masyarakat dan lain-lainnya, sehingga menambah legitimasi dan otoritas kerja pemantau. Jaringan kerja ini dibagi menjadi 8 wilayah; koordinator regional bekerja dengan markas pusat LHRA untuk merekrut dan melatih para pemantau (perhitungan kasarnya: total 48 orang).

Ketika para pemantau sudah siap untuk tugas ini, mereka diberikan sebuah kartu identitas LHRA dan dibekali surat tugas untuk ditunjukkan pada otoritas lokal. Ketika terdapat suatu dugaan kuat pelanggaran, mereka pergi ke masyarakat untuk mengumpulkan informasi dari para korban dan dari otoritas yang terlibat. Pemantauan difokuskan pada sejumlah persoalan, meliputi pekerjaan, kondisi hidup, pendidikan, perawatan kesehatan, partisipasi politik, kekerasan dengan motivasi ras serta akses pada fasilitas dan pelayanan umum.

Kantor nasional LHRA menyatukan semua kerja pemantau menjadi laporan-laporan berskala nasional dan menerbitkan terbitan berkalanya sendiri. Sebagai hasil dari taktik pemantauan ini, banyak pelanggaran HAM di level lokal yang telah

berhasil diangkat dan banyak lagi korban pelanggaran yang mulai berani tampil ke depan untuk mengajukan tuntutan-tuntutan mereka. Akhirnya pemerintah menerapkan kebijakan untuk menangani berbagai masalah diskriminasi di bidang pendidikan, perumahan dan pekerjaan. Baca lebih jauh mengenai hal ini di buku catatan mengenai taktik yang tersedia di situs web *www.newtactics.org*, dalam *Tools for Action*.

Taktik LHRA adalah sebuah kombinasi unik antara tekanan dan promosi HAM. Orang-orang etnis *gypsy (Rom)* yang jadi pemantau telah belajar tentang hak-hak mereka. Ini memperkuat mereka untuk mengambil tindakan-tindakan yang lebih efektif. Di sisi lain keinginan kuat pihak pemerintah untuk bergabung di dalam Uni Eropa membuatnya semakin peka terhadap laporan-laporan pelanggaran HAM, sehingga menyediakan kesempatan penting untuk meningkatkan dampak kerja para pemantau. Taktik ini juga merupakan sebuah penerapan hukum internasional yang cukup unik pada kehidupan sehari-hari warga. Hal ini juga telah meningkatkan posisi tawar yang berpengaruh atas pelanggaran-pelanggaran HAM di negara-negara lainnya yang telah menandatangani perjanjian HAM Internasional dan yang memiliki kepentingan untuk memperbaiki catatan HAM mereka di hadapan masyarakat internasional.

*Taktik-taktik kami (pada awalnya)
membuat pemerintah Slovakia tidak nyaman,
kadang kala kami juga mengalami perlakuan diskriminatif
dari agen-agen pemerintah. Namun tujuan kami—
memastikan penghormatan terhadap hak-hak dasar warga—
secara bertahap mulai tercapai.
Dan negara telah berubah menjadi mitra
dan bahkan sekutu kami dalam hal ini*

*Columbus Igboanusi
LHRA, Slovakia*

Anak-Anak Sebagai Advokat Bagi Hak-Hak Mereka Sendiri: Memperkuat anak-anak dengan informasi, kemampuan dan dukungan untuk membela hak-hak mereka sendiri

Ketika dibekali dengan kemampuan dan akses atas informasi yang patut, anak-anak dapat mempertahankan dan membela hak-hak mereka sendiri.

Di India, *Concerned for Working Children*—CWC (Kelompok Pemerhati Buruh

Anak) memfasilitasi anak-anak untuk membuat struktur formal seperti serikat buruh dan badan-badan terkait untuk membela hak-hak mereka sendiri. Melalui kerja-kerja ini, CWC memperkuat partisipasi anak, khususnya mereka yang menjadi buruh atau termarginalkan dalam pengambilan keputusan dan dapat mengatur berbagai hal yang menjadi kepentingan mereka. CWC telah terlibat aktif dalam kerja-kerja ini sejak tahun 1980 dan kini bekerja di lima wilayah di Karnataka.

Upaya CWC untuk memperkuat buruh anak pada awalnya, bermula pada terbentuknya *Bhima Sangha* – sebuah perserikatan dari, oleh dan untuk buruh anak. *Bhima Sangha* telah memiliki keanggotaan sebanyak 13.000 anak di Karnataka dan adalah mitra penting dalam kerja-kerja CWC untuk memfasilitasi anak untuk mengambil peran proaktif dalam pembuatan keputusan. Sejak saat berdirinya di tahun 1990, *Bhima Sangha* telah menjadi advokat tangguh atas hak-hak buruh anak dan memiliki kepedulian yang sama atas peningkatan kualitas hidup para orang tua dan komunitas mereka. Di tingkat nasional dan regional, *Bhima Sangha* mendampingi buruh-buruh anak lainnya dalam membentuk perserikatan mereka. CWC juga memiliki andil sangat penting dalam pembentukan Gerakan Buruh Anak Nasional dan Internasional di India.

Demikianlah, selain CWC dapat mempengaruhi pembuatan-pembuatan program dan kebijakan yang berdampak pada anak, anak-anak itu sendiri juga kemudian menuntut peran yang lebih formal dalam pemerintahan. Ini mengarah pada pembentukan—apa yang nantinya disebut sebagai *Makkala Panchayat*, atau Pemerintahan Anak—yang dipilih sendiri oleh anak-anak di komunitas tersebut. Anak-anak merancang strukturnya dan menetapkan tujuan dan gaya kepemimpinannya. Karena anak-anak menginginkan wadah ini memiliki sebuah status yang resmi di hadapan pemerintah lokal, atau *Panchayat*; CWC mengembangkan sebuah mekanisme untuk mengintegrasikan *Makkala Panchayat* secara resmi dengan pemerintahan desa melalui suatu tim di bawah naungan Kementerian Urusan Daerah. Tim ini meliputi orang dewasa maupun anak-anak. Pemilihan untuk *Makkala Panchayat* sendiri diadakan oleh otoritas pemerintahan resmi dan sekretaris *Panchayat* Dewasa menjalankan perannya dengan berdampingan bersama, selaku sekretaris *Panchayat* Anak.

CWC mengajarkan kepada anak-anak, beragam ketrampilan seperti kajian, dokumentasi, komunikasi, negosiasi dan advokasi. Anak-anak itu juga menggunakan teater, perwayangan, lagu-lagu, terbitan/publikasi, majalah dinding dan peralatan audio video untuk mendukung pendirian dan prinsip-prinsip mereka. Dengan cara ini mereka mengungkapkan prioritas mereka, menyokong pernyataan mereka dan mendukung perubahan. Untuk memelihara hubungan yang baik dengan pemerintah

lokal, anak-anak menghindari afiliasi-afiliasi politik dengan organisasi-organisasi politik tertentu, namun terlibat aktif di dalam debat-debat politik.

Melalui partisipasi teratur mereka dalam struktur politik dan pemerintahan lokal, anak-anak menjadi semakin sadar-diri dan mereka membuat negara bertanggung jawab. Partisipasi mereka dalam ruang politik juga memampukan kelompok-kelompok terpinggirkan, seperti perempuan dan kelompok-kelompok etnis, untuk mengubah situasi mereka yang terdesak dan mengukuhkan tatanan demokrasi.

Kini tercatat ribuan anak berpartisipasi dalam pemerintahan desa-desa mereka dan orang-orang dewasa yang secara tradisional cenderung feodal dan patriarkal telah beralih menjadi pembela hak-hak anak. Mereka melihat suatu nilai dalam partisipasi yang aktif dan setara dari anak-anak tersebut, seiring dengan pengelihatannya sendiri, bahwa berbagai perubahan baru ini mulai mendatangkan keuntungan menyeluruh bagi seluruh masyarakat².

Organisasi-organisasi anak telah sangat kuat dalam mengatasi persoalan-persoalan berlingkup luas pada level lokal, termasuk masalah air dan bahan bakar, perumahan, pensiun bagi orang-orang lanjut usia maupun para penyandang cacat, eksploitasi tenaga kerja anak, substansi pelanggaran dan perkawinan anak. Mereka juga menyumbang secara substansial untuk kebijakan-kebijakan anak-anak di level negara, nasional dan internasional.

Dasar dari pekerjaan CWC adalah memperkuat buruh anak, sehingga mereka dapat menjadi barisan pertama dalam pertahanan dan partisipasi dalam suatu cara yang terdidik di semua keputusan mengenai diri mereka sendiri. CWC telah menunjukkan bahwa kondisi kehidupan yang bermasalah dan tantangan yang dihadapi anak-anak dapat menjadi lebih mudah diatasi melalui pendidikan, penguatan dan kemitraan dengan para orang dewasa. Kerja CWC bersama-sama dengan pemerintah lokal, komunitas dan para pekerja anak itu sendiri adalah untuk menerapkan solusi yang dapat dipraktikkan, menyeluruh, berkesinambungan dan patut. Hasilnya adalah sebuah kualitas kehidupan yang meningkat bagi semua anggota masyarakat, yang dimungkinkan berkat masukan dari anak-anak itu sendiri.

2 Journey in Children's Participation, Nandana Reddy dan Kavita Ratna, The Concerned for Working Children, India, 2002

Membangun Kesadaran

Menggugah masyarakat di sebuah komunitas agar sadar akan hak-hak kemanusiaannya adalah langkah pertama dalam mewujudkan komunitas yang menghargai hak asasi manusia. Ketika masyarakat tidak sadar akan hak-hak mereka, maka praktik-praktik kekerasan oleh pemerintah, kelas penguasa atau kekuatan lain akan diterima, dimaklumi atau bahkan justru diabaikan begitu saja. Taktik-taktik dalam Bab ini akan berkisar seputar pembangunan kesadaran, baik atas konsep besar hak asasi manusia maupun pada masalah-masalah lebih spesifik mengenai penerapan hak-hak tersebut di level perorangan maupun masyarakat.

Tantangan yang banyak dihadapi dalam banyak kasus adalah bagaimana membuat masyarakat melihat relevansi hak asasi manusia di dalam kehidupan mereka sendiri. Mereka yang hidup di komunitas terpencil mungkin tidak sadar bahwa mereka juga memiliki hak-hak tersebut. Mereka mungkin tidak pernah mendengar mengenai keberadaan konvensi Internasional atau hukum-hukum nasional, atau mungkin juga tahu tapi tidak menyadari bahwa kesemuanya itu berlaku juga bagi diri mereka. Sementara sebaliknya, masyarakat di negeri-negeri yang telah sedemikian maju, mungkin percaya bahwa istilah “hak asasi manusia” serta segala pemahaman yang mendasarinya, hanya berlaku bagi bangsa-bangsa di negeri miskin belaka.

Pendidikan Hukum di Daerah Terpencil: Mendidik masyarakat di daerah terpencil mengenai hak-hak mereka dan menghubungkan mereka dengan kalangan pengacara untuk mempertahankan hak-hak tersebut

Dalam komunitas yang terisolasi secara geografis, yang juga memiliki kesenjangan budaya maupun adat-istiadat—kurangnya pengetahuan mungkin bisa dapat dianggap sebagai tantangan terbesar yang membuat masyarakat tersebut tidak sepenuhnya mendapatkan keuntungan atas hak-hak mereka. Sebuah kelompok di Muangthai menggabungkan pendidikan komunitas—melalui teater-teater rakyat dan menarik serta pelatihan—dengan akses ke sistem hukum nasional, untuk memastikan bahwa masyarakat tidak hanya sadar akan hak-hak mereka, tetapi juga aktif memperjuangkan hak-hak tersebut.

ThongbaiThongpaoFoundation–TTF(YayasanThongbaiThongpao)diMuangthai menghadirkan bantuan hukum cuma-cuma untuk masyarakat di daerah terpencil, bersamaan dengan pelatihan mengenai hak-hak dasar dan Undang-Undang yang mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari. Pada saat Muangthai menikmati laju pertumbuhan ekonomi yang cepat di tahun 1990-an, tingkat kehidupan yang meningkat lebih banyak terjadi di daerah metropolitan. sementara populasi di pedesaan tertinggal secara ekonomis dan kurang memiliki kesadaran akan hak-hak mereka yang sesungguhnya dijamin oleh konstitusi modern Muangthai. Hal ini mengakibatkan mereka menjadi lebih rentan terhadap eksploitasi, oleh praktik-praktik pegawai pemerintah yang korup maupun rentenir.

Pembelajaran hukum yang dilakukan TTF ke desa-desa diutamakan pada para guru, siswa, pemimpin komunitas, petani miskin dan perempuan sebagai target pembelajaran. Staf TTF dan sebuah regu pengacara relawan mengadakan pelatihan kerja di akhir pekan ke desa-desa, yang lazimnya dilakukan atas permintaan dari masyarakat desa yang tengah menghadapi masalah dengan petugas negara. Dalam pelatihan dua hari penuh tersebut, para peserta belajar mengenai hukum Undang-Undang Dasar, hak asasi manusia, permasalahan hukum perkawinan, hutang-piutang dan pegadaian, hukum perburuhan dan masalah-masalah hukum lainnya yang menyangkut kehidupan mereka. Teater dan dramatisasi kasus-kasus di pengadilan melengkapi proses pengajaran dan diskusi tersebut.

Di akhir kursus, peserta menerima kartu identitas berfoto lengkap dengan nama dan dibubuhi tanda tangan dari pengacara praktik yang kemudian akan menjadi kuasa hukum pribadi mereka. Di balik kartu tersebut tertera daftar hak-hak sebagai terdakwa: hak untuk diam, hak untuk mendapatkan bantuan hukum, hak untuk mengetahui dakwaan terhadap diri mereka dan hak memperoleh jaminan hukum. Setelah program selesai, sebuah komite hukum terdiri dari 5-7 orang ahli hukum lokal, ditempatkan di desa tersebut untuk memastikan bahwa standar hak asasi manusia telah diterapkan dan juga untuk membantu mengatur pelatihan lanjutan.

Ketimbang memakai konsep-konsep yang terlalu tinggi dan abstrak, TTF menyebarkan informasi dan keahlian praktis yang dapat digunakan oleh penduduk desa untuk mempertahankan hak-hak mereka. Kekuatan kartu nama bisnis yang diberikan kepada seseorang jangan dilihat sepele: mengetahui bahwa Anda mempunyai seseorang yang dapat dihubungi kapan saja jika mengalami tindak kekerasan tidak hanya memberikan kekuatan mental, tetapi juga dapat membuat seseorang membatalkan niatnya untuk melanggar hak-hak Anda.

Taktik ini sangat berharga di daerah-daerah terpencil dan terisolasi di seluruh dunia, di mana masyarakatnya tidak menyadari hak-hak yang mereka miliki atau tidak merasa memiliki kekuatan untuk menembus sistem keadilan. Taktik ini juga menawarkan tindakan hukum sebagai perlindungan yang mungkin dilakukan bagi korban tindak kekerasan. Taktik yang serupa di Uganda mendidik masyarakat di daerah terpencil mengenai hak-hak mereka, dan menciptakan jalan masuk untuk mediasi.

*Apa sajakah yang dapat menjadi
"Tanda pemberian kekuatan"
(seperti kartu nama bisnis yang dicontohkan di sini)
yang mungkin dapat membantu mereka yang terhalang
untuk tetap menegakkan hak-hak mereka?*

Teater Pemecah Kebisuan: Menggunakan teater untuk memecah kebisuan atas masalah-masalah sensitif sambil memfasilitasi pendidikan HAM dan hukum

Di Senegal, sebuah kelompok menyediakan informasi mengenai hak-hak hukum untuk masyarakat daerah yang terisolasi bukan hanya karena letak geografis, tapi juga oleh norma budayanya.

African Resource for Integrated Development–RADI (Sumber Afrika untuk Pembangunan Terintegrasi) mendidik perempuan-perempuan mengenai kekerasan rumah tangga melalui drama-drama teatral yang pendek dan lucu serta bersifat informal, dan diskusi yang dipimpin oleh tenaga paralegal mengenai sumber perlindungan hukum yang tersedia bagi mereka. Melalui penggunaanteater, RADI bertujuan untuk memecah kebisuan di seputar masalah kekerasan rumah tangga di Senegal .

Kekerasan rumah tangga, secara khusus yang berhubungan dengan masalah seksual, adalah topik yang tabu di Senegal, dan sangat jarang dilaporkan ke pihak yang berwenang. Dalam sebuah negara di mana 95% dari populasi Senegal memeluk agama Islam dan banyak yang memiliki pemahaman bahwa hukum keagamaan memperbolehkan beberapa bentuk kekerasan rumah tangga, RADI harus menemukan cara yang efektif untuk meningkatkan kesadaran mengenai perUndang-Undangan yang baru disahkan. Dikarenakan masih banyak masyarakat yang buta huruf, dan dikarenakan teater telah mengalami kebangkitan yang mengagumkan, RADI memilih teater sebagai jalan untuk meningkatkan kemampuan untuk meraih peserta, meningkatkan kesadaran akan isu-isu kekerasan rumah tangga dan

membuat masyarakat sadar akan adanya sumber-sumber yang tersedia.

RADI menghadirkan aktor-aktor yang cukup dikenal yang memilih perempuan dari para pemirsa yang hadir untuk bergabung dengan mereka dalam 10 menit improvisasi drama yang menggambarkan situasi kekerasan rumah tangga. Aksi spontan dari para perempuan dan anggota pemirsa lainnya menguak keterbiasaan mereka sehari-hari atas situasi-situasi tersebut. Drama-drama yang dihadirkan diakhiri tanpa pemecahan masalah, sebagai pintu bagi para ahli hukum memfasilitasi diskusi mengenai pemecahannya, serta pilihan-pilihan lainnya untuk mengatasi kekerasan rumah tangga. Para ahli hukum juga memastikan untuk menghadirkan sumber-sumber hukum yang tersedia termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pidana.

Dalam taktiknya RADI menunjuk pada dua sumber budaya penting. Pertama, teater telah diterima secara meluas dan dipahami benar sebagai media pengajaran di Senegal . Kedua, program-program yang dilakukan diatur di sekitar *"mbottayes"*, perkumpulan tradisional tidak resmi untuk perempuan yang secara umum menjamin kehadiran peserta yang banyak pada diskusi-diskusi kelompok. RADI melaporkan bahwa banyak peserta dalam teater dan diskusi-diskusi tidak hanya belajar lebih mengenai hak-hak mereka tetapi juga menyebarkan informasi tersebut ke anggota keluarga dan teman-teman.

Banyak kelompok yang menggunakan teater dan sandiwara untuk mempromosikan hak-hak asasi manusia, tetapi RADI menggabungkan hukum dan teater dengan cara yang unik. Sebagian alasan keberhasilan RADI dalam meraih peserta adalah menggunakan struktur sosial yang tersedia seperti *"mbottayes"*. Aspek teater menawarkan insentif lebih jauh untuk berpartisipasi – yaitu hiburan – dan menawarkan peserta selapis perlindungan yang memfasilitasi percakapan tanpa mengharuskan mereka untuk membuka situasi pribadi mereka.

"Tradisi budaya apa sajakah di daerah Anda yang menciptakan penghalang untuk berbicara mengenai isu-isu hak-hak kemanusiaan tertentu? Tradisi budaya apa sajakah yang dapat digunakan untuk mengatasi halangan-halangan dan memecahkebiasuan?"

“Jumlah perempuan-perempuan yang menghadirkan diri mereka sendiri untuk mengangkat kasus-kasus kekerasan telah meningkat dan dalam catatan yang sama—untuk beberapa kasus—kaum perempuan mengambil tindakan meninggalkan (pernikahan) dan mengupayakan pembatalan pernikahan”

Deputi Penuntut Umum
Republik Senegal

Mengklaim-ulang Tradisi: Menggunakan keahlian dalam menghubungkan HAM dengan budaya dan tradisi setempat

Hak asasi manusia mungkin terlihat lebih sebagai sesuatu yang dihadirkan dari luar atau ‘dari atas’. Sebuah lembaga HAM regional yang bekerja di belahan dunia Arab menguatkan HAM dengan memperlihatkan bahwa sebenarnya hak-hak tersebut adalah sudah menjadi bagian integral dari budaya di wilayah tersebut.

Cairo Institute of Human Rights Studies—CIHRS (Lembaga Studi HAM Kairo) di Mesir menggunakan seni dan sastra untuk memperlihatkan bahwa HAM telah ada dan telah lama diakui dan dirayakan dalam kultur dunia Arab. Walau banyak dari negara-negara Arab telah mendukung Deklarasi Universal HAM (*Universal Declaration of Human Rights*—UDHR), namun beberapa di antaranya masih menggambarkan bahwa UDHR, dan perlindungan HAM secara umum sebagai konsep Barat.

CIHRS menggunakan berbagai macam pendekatan untuk menggambarkan akar dari hak-hak asasi manusia di dalam masyarakat Arab yang Islami, dari berbagai cerita rakyat, karya sastra dan film. Para artis misalnya, diundang, untuk turut hadir dalam acara Pemutaran Film Bulanan CIHRS. Di situ para pembicara tamu yang diundang akan mendiskusikan film-film tersebut serta hubungan eratnya dengan hak-hak asasi manusia. Para sutradara dan kritikus film kerap pula hadir dalam acara Pemutaran Film Bulanan tersebut. *CinemaClub for Human Rights* (Klub Sinema untuk HAM) adalah salah satu contoh wadah pertama dari jenis ini di dunia Arab.

Sebagai tambahan, CIHRS menerbitkan sebuah buku kecil (*booklet*) berseri yang berjudul *Human Rights in Art and Literature* (HAM dalam Seni dan Sastra) yang menekankan peran seni dan sastra dalam memilah menyebarkan pemahaman akan hak-hak asasi manusia; sejauh ini CIHRS telah menerbitkan 10 buku. Para artis

tersebut selalu didorong untuk menghadirkan pengalaman mereka sendiri secara menarik, yang berhubungan dengan nilai-nilai kemanusiaan..

Melalui klub-klub film dan berbagai *booklet*, CIHRS telah membangun jaringan kerja yang terdiri dari artis-artis yang memiliki ketertarikan untuk mempromosikan HAM, memberanikan mereka untuk menciptakan sejumlah project film yang mempromosikan HAM ke tengah masyarakat. Terkadang CIHRS juga memilih tema khusus. Di situ mereka memperkenalkan bagaimana pendekatan-pendekatan seni dapat memainkan peran dan dapat menjangkau anggota-anggota jaringan lainnya, yang secara gemilang dapat mengangkat isi tema tersebut melalui berbagai media lainnya.

Melalui pendekatan ini semua, CIHRS telah memberikan sumbangan kesadaran yang lebih besar atas hubungan budaya dengan hak asasi manusia di Mesir dan dunia Arab.

CIHRS mempergunakan film, seni dan sastra untuk membantu masyarakat setempat menegaskan kembali kepemilikan esensial hak asasi atas tiap insan; dengan cara ini pula CIHRS menangkis pandangan setempat bahwa hak asasi manusia adalah 'barang asing' dan membuka kemungkinan untuk membangun semangat penghormata luas atas gerakan hak asasi manusia.

Pendekatan ini berjangka panjang dan tidak mungkin mendatangkan perubahan cepat dalam masyarakat, juga paling mungkin menarik bagi orang-orang yang telah terlebih dulu tertarik pada bentuk-bentuk seni-budaya. Tetapi dengan mengangkat contoh-contoh kultural yang telah mengakar begitu dalam pada masyarakat tertentu—contoh-contoh yang dapat membuat banyak orang merasa terhubung secara langsung, seperti kisah-kisah epik/kepahlawanan nasional maupun kisah-kisah populer anak—taktik ini akan dapat menjangkau segmen populasi yang lebih besar.

Tradisi-tradisi budaya lokal, mitos-mitos dan teks juga dapat digunakan sebagai alat pendidikan, sebagai contoh mengenai prinsip-prinsip HAM yang dengan cepat dapat dipahami. *Sisterhood is Global Institute* (SIGI) yang berbasis di Kanada, menggunakan sebuah model pendidikan informal yang membantu perempuan-perempuan Muslim untuk dengan mudah mengidentifikasi konsep-konsep HAM universal dalam konteks budaya lokal. SIGI mengembangkan satu seri manual yang dapat digunakan di manapun perempuan berkumpul, baik secara publik maupun secara privat. Manual tersebut mendorong diskusi mengenai konsep-konsep hak asasi manusia dalam konteks yang memiliki relevansi dengan kehidupan sehari-hari perempuan-perempuan tersebut.

*“Tiap budaya menjunjung nilai-nilai keadilan,
harga diri, kebebasan dan persamaan hak.
Seni dan sastra juga dapat amat membantu
melahirkan budaya HAM.*

*Pendekatan yang kita lakukan adalah menukik ke hati masyarakat,
bukan hanya di ranah pikiran saja,
dalam membuka kesadaran mereka akan hak-hak asasi manusia”*

Bahey El Din Hassan
Cairo Institute of Human Rights Studies,
Mesir

Sebuah Cara Baru Memahami Keadilan Sosial: Melatih berbagai organisasi untuk menempatkan kerja-kerja keadilan sosial dalam konteks HAM dan dengan demikian memberikan para advokat tersebut perangkat dan akses baru untuk membangun sebuah aliansi

Dikarenakan begitu banyak orang di negara berkembang memandang “hak asasi manusia” hanya berhubungan dengan dunia maju, pemahaman dan nilai hak-hak kemanusiaan menjadi seperti amat sulit dijangkau dan asing. Sikap ini bermuara pada rasa puas-diri yang membahayakan, sesuatu yang tengah diperangi oleh sebuah kelompok di Amerika Serikat.

NCHRE—*National Center for Human Rights Education* (Pusat Pendidikan Hak Asasi Manusia Nasional) melatih berbagai organisasi di Amerika Serikat agar menempatkan isu keadilan sosial sebagai persoalan hak asasi manusia. Di saat banyak organisasi-organisasi di Amerika Serikat bekerja mengatasi isu-isu keadilan sosial, sedikit saja di antara mereka yang sadar bahwa kerja-kerja mereka juga berkaitan erat dengan konteks hak asasi manusia.

Pada tahun 1997 dari pengumpulan data yang diselenggarakan NCHRE, didapati data bahwa lebih dari 90% warga Amerika tidak mengetahui keberadaan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Untuk menanggapi rendahnya pemahaman akan HAM di Amerika Serikat, NCHRE menciptakan sebuah kurikulum pendidikan HAM bagi organisasi-organisasi masyarakat yang bergerak di bidang keadilan sosial.

NCHRE juga menyelenggarakan berbagai konferensi, pertemuan, acara-acara komunitas dan telah mendistribusikan hampir setengah juta (500.000) salinan buku saku mengenai Deklarasi Universal HAM.

Dalam sesi pelatihannya, NCHRE menekankan esensi universal hak asasi manusia, sambil memperagakan bahwa setiap orang dapat menjadi pelaku ataupun korban kekerasan. NCHRE juga mengajarkan cara melindungi hak asasi manusia, secara khusus melalui pelatihan aspek-aspek hukum dan teknik dari hak asasi manusia. Para pelatih kemudian bekerja dengan para peserta membangun rencana konkret yang akan dipraktikkan di dalam komunitas mereka masing-masing.

Para peserta yang hadir dalam pelatihan membawa ide-ide dan ketrampilan-ketrampilan yang mereka dapatkan dari pelatihan ke dalam organisasi-organisasi mereka, dengan demikian meningkatkan jangkauan kerja NCHRE secara riil. Sejak masa pendiriannya, NCHRE telah melatih lebih dari 16.000 ahli hukum keadilan sosial dalam bidang hak asasi manusia. Sejumlah kelompok yang dilatih oleh NCHRE telah menggunakan penerapan hak asasi manusia untuk menghasilkan perubahan positif di komunitas mereka. Sebagai contoh *Georgia Citizens Coalition for Hunger* (Koalisi Warga Georgia untuk Kelaparan) menggunakan argumen-argumen berdasarkan HAM untuk mempengaruhi mereka yang berkuasa agar membuat Undang-Undang di Negara bagian yang—untuk pertama kalinya dalam lebih dari 30 tahun—menyetujui peningkatan upah minimum.

NCHRE juga menghadapi sikap penolakan dari pihak pemerintah dan masyarakat pada umumnya yang melihat prinsip-prinsip HAM tidak relevan bagi Amerika Serikat [‘yang dianggap sudah sedemikian beradab’], bahwa permasalahan hak asasi manusia, seperti yang diberitakan media tidak pernah terjadi di Amerika Serikat. Bagi kelompok-kelompok yang sudah terjun memerangi masalah-masalah seperti bencana kelaparan, kemiskinan, maupun tuna wisma, kerja-kerja NCHRE menyediakan taktik-taktik baru. Ketika kelompok-kelompok ini mulai menempatkan karya mereka dengan cara baru, mereka mulai mengenali perkumpulan-perkumpulan baru dan mungkin juga dapat menarik orang-orang baru untuk bergabung dengan kerja mereka.

*Ada banyak masalah yang pelik dan sulit diatasi
(di Amerika Serikat),
seperti kurangnya penyediaan layanan kesehatan,
reformasi bidang kesejahteraan dan rasialisme.
Perundang-undangan yang ada tidak menyediakan perlindungan cukup
bagi warga negara yang termasuk dalam kategori ini.
Pilihan yang tersedia bagi kami adalah*

*mengacu pada kerangka HAM global,
yang mengangkat isu-isu tersebut ke tingkat semestinya,
yang mengubah hakikat wacana dan perpolitikan
di negara ini*

Loretta Ross
*National Center for Human Rights Education,
Amerika Serikat*

Menegaskan Tujuan melalui Pemetaan: Pemetaan secara visual untuk menciptakan kesadaran publik dan tekanan demi perubahan kebijaksanaan

Siapa pun pemirsa yang hendak dijangkau, penyajian masalah secara visual atas problem yang tengah Anda atasi, akan dapat menjadi sebuah piranti yang sangat kuat. Sebuah organisasi internasional pencinta lingkungan hidup di Lebanon (*Greenpeace Lebanon*) secara efektif menggunakan pemetaan untuk menggambarkan bahaya pengrusakan lingkungan di sepanjang pantai Lebanon .

Kantor *Greenpeace Lebanon* memetakan pengrusakan lingkungan yang terjadi di sepanjang pantai Negara tersebut untuk mendidik masyarakat umum mengenai masalah limbah industri beracun dan menekan pemerintah agar melembagakan kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut.

Kelompok ini berhasil menarik perhatian luas dari masyarakat akan kondisi lingkungan sepanjang garis pantai Lebanon, dengan melakukan kunjungan perahu karet ke wilayah-wilayah baru setiap minggunya. *Greenpeace Lebanon* memberikan sorotan utama atas daerah sepanjang garis pantai yang paling banyak dihuni dan paling sering tercemar. Survei wilayah ini dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak GIS—*Geographical Information System* (Sistem Informasi Geografis) untuk menghasilkan pemetaan atas hasil-hasil survei. Masyarakat mengikuti perkembangan hasil kerja perahu-perahu karet *Greenpeace* melalui siaran TV, berita di koran, website organisasi tersebut atau bahkan datang langsung ke wilayah pantai, tempat diumumkankannya hasil survei. Perkembangan kemajuan survei perahu secara mingguan mendaatngkan antusiasme masyarakat

yang sangat besar dan bahkan ketegangan dalam pikiran banyak orang: apa kiranya yang akan ditemukan di lokasi berikutnya? Pada akhir masa kampanye, pemetaan itu sendiri menjadi sebuah ilustrasi grafis atas lokasi limbah beracun dan seberapa jauh merusakkan lingkungan atas seluruh garis pantai.

Greenpeace menggunakan beberapa taktik lain yang dikombinasikan dengan project pemetaan. Para anggota mengusahakan *lobby* dengan para politisi, lembaga-lembaga pemerintah, pemilik gedung dan usaha bisnis di sepanjang pantai. Seorang staf ditugaskan untuk memastikan agar informasi diangkat ke media sambil menjaga ketertarikan pihak media serta memastikan jangka waktu pemberitaan survei untuk menjaga antusiasme publik. Kelompok ini juga menarik perhatian dengan menggunakan media radio, bukti-bukti nyata, poster besar yang bisa berpindah tempat, serta spot animasi televisi yang menggambarkan efek jangka panjang atas benda-benda yang tercemar limbah.

Kesadaran masyarakat yang dihasilkan dari kampanye ini telah membantu mendorong disahkannya Undang-Undang No.444. Di dalam salah satu pasalnya yang mengatur kewajiban atas lingkungan, ada hak masyarakat atas akses informasi.

Greenpeace Lebanon berhasil mengubah informasi yang teknis dan kering menjadi penjelasan yang mudah dipahami—menjadikannya fakta mudah dimengerti anggota masyarakat sambil terus membangkitkan ketertarikan mereka terhadap masalah ini; dengan demikian secara bersamaan menggerakkan masyarakat untuk mengambil tindakan bersama guna mengatasi masalah tersebut. Masalah kejahatan terhadap lingkungan telah sedemikian rupa disembunyikan, sehingga masyarakat yang terkena akibatnya bahkan tidak lagi menyadari tindak-tanduk tersebut. Dengan mengungkapkan masalah ini, Kelompok *Greenpeace* telah menciptakan kekuatan baru untuk bekerja memerangi hal tersebut. Kunci dari keberhasilan ini—peningkatan kesadaran dan membukakan jalan bagi lahirnya Undang-Undang lingkungan baru—adalah penyampaian pesan yang kuat dan liputan media untuk menyorot usaha pemetaan, di mana secara bersamaan kelompok tersebut juga melancarkan *lobby* untuk perubahan kebijakan.

Pemetaan GIS juga bisa digunakan untuk mengangkat dan memerangi berbagai masalah hak asasi manusia lainnya, seperti perdagangan seks. Sistem ini juga dapat digunakan untuk menunjukkan praktik-praktik penyiksaan di kantor-kantor polisi, menggambarkan persebaran luasnya kemiskinan dengan menggambarkan pendapatan rata-rata kepala rumah tangga di sebuah wilayah, atau memotret akses (maupun kurangnya akses) atas pelayanan vital dengan menunjukan lokasi-

lokasi sumur, rumah sakit atau sekolah. Ketika kita berhasil melihat cakupan sebuah permasalahan, kita juga menjadi lebih siap menanggapi masalah tersebut.

Memahami Bagaimana Kita Bisa Sampai Ke Sini dan Arah Kita Melangkah: Menggunakan kekuatan emosional situs bersejarah dan kisah-kisah personal untuk meningkatkan kesadaran mengenai persoalan HAM hari ini

Berbagai kisah nyata dapat membantu mengangkat berbagai persoalan HAM yang lazimnya kering atau jauh dari diri kita, menjadi sedemikian dekat dan hidup. *Museum Tenement* di New York City mempergunakan kisah-kisah masa lalu untuk mengangkat diskusi dan kesadaran akan hak-hak perburuhan saat ini.

Pembangunan kembali sebuah apartemen (dari tahun 1897) dan toko jahit, *Museum Lower Eastside Tenement* di New York City menyatukan kembali representatif pihak-pihak industri garmen yang bertikai untuk mendiskusikan penanganan yang harus dilakukan—dan oleh siapa—untuk mengatasi permasalahan ‘*sweatshops*’ (pabrik-pabrik yang mempekerjakan buruh di bawah kondisi yang tidak manusiawi) saat ini.

Museum Tenement merupakan renovasi gedung dari sebuah apartemen di jalan Orchard 97, tempat lebih dari 7.000 imigran dari 20 negeri yang berbeda hidup antara tahun 1863-1935. Situs ini menjadi saksi atas kisah perjuangan bertahan hidup mereka di Amerika. Di tahun 1897, Harris dan Jennie Levine, pendatang imigran dari Plonsk (sekarang Polandia) menjalankan usaha toko garmen di apartemen mereka. Dari sinilah istilah ‘*sweatshops*’ berasal. Saat ini ada lebih dari 400 toko garmen di Amerika Serikat, yang mempekerjakan 15,000 orang buruh imigran. Dewasa ini Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat mengklasifikasi bahwa hampir $\frac{3}{4}$ dari mereka adalah ‘*sweatshops*’, tetapi perdebatan masih berlangsung atas pemahaman atau arti sesungguhnya dari ‘*sweatshops*’ itu sendiri, serta apa yang harus dilakukan untuk mengangkat masalah kekerasan atas buruh dan siapa pula yang seyogianya bertanggung jawab.

Museum ini telah mengubah kediaman keluarga Levine menjadi sebuah pusat tempat pihak-pihak yang bergelut di bidang industri garmen, dapat bertukar pikiran mengenai pemecahan masalah. Dalam pertemuan pertama di tahun 2002, perkumpulan ini mengundang beragam peserta yang tidak biasa, termasuk di

dalamnya perwakilan dari organisasi *Human Rights Watch*, UNITE – *Garment Workers Union*), *Levi's* dan *Ellen Fisher* (merk-merk pakaian ternama), King's County Manufacturers Association dan banyak lainnya lagi. Sambil beramah-tamah di lingkungan yang akrab, pimpinan-pimpinan kelompok yang sering dianggap sebagai pihak oposisi dari industri garmen, mendengarkan paparan mengenai cara keluarga-keluarga imigran ini tidur, makan, menghidupi sebuah keluarga dan menghasilkan pakaian di ruang sempit tersebut, yang luasnya hanya 325 kaki per segi.

Masih sehubungan dengan pertemuan ini, kelompok ini mengadakan pertemuan satu hari penuh untuk mengeksplorasi pandangan baru yang seyogianya dicapai dengan meneropong pada masa lalu industri-industri garmen, serta pemikiran-pemikiran baru yang dihasilkan untuk mencegah kondisi '*sweatshops*' di masa mendatang. Semenjak pertemuan pertama di tahun 2002, museum ini telah dijadikan tempat untuk pengadaan dialog-dialog serupa yang dihadiri lusinan kelompok industri garmen.

Baca lebih jauh mengenai hal ini dalam buku catatan mengenai taktik yang tersedia di www.newtactics.org, di bawah *Tools for Action*.

Adalah sangat penting untuk menghadirkan fasilitator yang kuat dan untuk membangun dialog ini secara hati-hati, sehingga dapat mengubah reaksi pribadi orang terhadap isu-isu masyarakat yang lebih besar, menghargai dan mendengarkan pandangan dari pihak bertentangan dan mendapatkan kesempatan untuk bertukar pandangan dalam kelompok kecil atau forum yang lebih besar.

***“Sebuah gambar serupa dengan seribu kata”
Bagaimana Anda dapat menggunakan gambar
atau media visual lainnya
untuk mempromosikan tujuan Anda?***